



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2022**

**DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya. .

Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja
- b. penyusunan rancangan awal Renja
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah
- d. Perumusan rancangan akhir Renja
- e. Penetapan Renja.

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah

yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Tahun 2021 merupakan tahun yang krusial mengingat mulai berlakunya penggabungan 2 (dua) dinas urusan sosial dan dinas urusan tenaga kerja transmigrasi menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta secara resmi. Sebelumnya, urusan pemerintahan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diampu oleh dua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berbeda, yakni Dinas Sosial dan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, urusan pemerintahan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi diampu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun dengan memperhatikan pula beberapa isu krusial terkait dampak pandemi Covid-19 yaitu naiknya tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta (dari 6,84% di tahun 2019 menjadi 7,27% di tahun 2020), meningkatnya jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dari 41.999 di tahun 2019 menjadi 48.374 di tahun 2020 (atau naik sebesar 15,18%), kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 15,38%, menurunnya ratio kesempatan kerja untuk usia produktif sebesar 45,52%, meningkatnya angka sengketa perusahaan-pekerja sebesar 71,56% serta isu tentang Data kemiskinan dan penanganan pandemi Covid-19.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum meliputi:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang- undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
14. Peraturan Pemerintah No. 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

22. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 503 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Secara terinci maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta antara lain :

- a. Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada masyarakat,
- c. Memantapkan peran dan fungsi lembaga dalam koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2022 adalah:

- a. Meningkatkan kualitas mekanisme sistem perencanaan kerja yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung layanan masyarakat;
- c. Memantapkan koordinasi pelaksanaan pembangunan urusan sosial; tenaga kerja dan transmigrasi dengan para pemangku kepentingan;
- d. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA dan DPA SKPD;
- e. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2022;
- f. Menjadikan acuan kerja bagi seluruh seksi/sub bagian/bidang/UPT di lingkup Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
- g. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Mengingat pada tahun 2020 urusan pemerintahan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi diampu oleh OPD yang berbeda, maka evaluasi dilakukan terhadap Renja dua OPD. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial dan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2020 (bidang tenaga kerja) meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Yogyakarta mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2020.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari target fisik renja sebesar 100%, berhasil direalisasikan sebesar 100%. Terdapat 2 (dua) kegiatan di dalam program tersebut, dengan masing- masing realisasinya mencapai 100%. Dua kegiatan tersebut adalah:
 - a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi. Aktivitas dalam kegiatan tersebut antara lain penyediaan makan dan minum untuk koordinasi dan penyusunan laporan konsultasi ke luar daerah. Tingkat realisasi kegiatan ini adalah 100%.
 - b. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan ini melaksanakan berbagai aktivitas operasional perkantoran. Tingkat realisasi kegiatan ini adalah 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dari target fisik renja sebesar 100%, berhasil direalisasikan sebesar 100%. Terdapat 2 (dua) kegiatan dalam program ini, antara lain :
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor. Kegiatan ini berupa pemeliharaan gedung perkantoran dan UPT yang bernaung di bawah Dinas Sosial. Kegiatan ini terlaksana 100 %.

- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin untuk kendaraan dinas roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat), yang meliputi belanja jasa service, penggantian/ reparasi suku cadang, maupun belanja bahan bakar minyak/ pelumas. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 %.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Hanya terdapat 1 (satu) kegiatan pada program ini, yakni Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100 %.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Terdapat 4 kegiatan dalam program ini, antara lain :
 - a. Perlindungan Sosial.
Secara umum, kegiatan ini melakukan berbagai upaya perlindungan bagi PMKS terutama berkaitan dengan penanganan bencana serta intervensi Lansia. Aktivitas dalam kegiatan ini meliputi penyaluran bantuan bagi korban bencana, piket Tagana (Taruna Siaga Bencana), peningkatan kapasitas Tagana, penyelenggaraan workshop Pelopor Perdamaian, workshop UEP Lansia Potensial, Gelar Potensi Anak Panti Asuhan se-Kota Yogyakarta, Gelar Potensi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional serta Pembinaan Komisi Daerah Lansia. Seluruh aktivitas tersebut terealisasi 100 %.
 - b. Jaminan dan Bantuan Sosial
Kegiatan ini meliputi penyaluran berbagai bantuan sosial bagi PMKS baik yang bersumber dana dari APBN maupun APBD, antara lain BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), ASLUM (Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin), bantuan sosial bagi orang terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan, santunan kematian bagi keluarga miskin dan pelayanan jenazah terlantar serta mobil jenazah. Seluruh aktivitas tersebut dapat direalisasikan 100 %.
 - c. Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo.
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun anggaran berjalan, yakni pemenuhan kebutuhan hidup dasar anak miskin/terlantar. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 %
 - d. Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma.
Sama halnya dengan kegiatan sebelumnya, kegiatan ini juga dilakukan sepanjang tahun anggaran berjalan. Kegiatan ini melakukan

pemenuhan kebutuhan hidup dasar lansia miskin/terlantar. Realisasi fisik kegiatan ini juga mencapai 100 %.

5. Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial.

Program ini terdiri dari dua kegiatan antara lain :

a. Rehabilitasi PMKS

Aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi pelaksanaan bimbingan mental, sosial dan spiritual bagi PMKS seperti penyandang disabilitas, PRSE (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi), korban KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta ODHA (Orang dengan HIV/AIDS).

b. Advokasi dan Pendampingan PMKS

Aktivitas yang tercakup dalam kegiatan ini fasilitasi Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas, pemberian surat rekomendasi bagi PMKS, penanganan anak terlantar, pembinaan dan pendampingan KUBE (Kelompok Usaha Bersama), pelaksanaan peringatan Hari Disabilitas Internasional.

Kedua kegiatan tersebut dapat terealisasi 100 %.

6. Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial

Program ini terdiri dari dua kegiatan, antara lain :

a. Pendataan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial).

Kegiatan ini melakukan pendataan dan verifikasi data yang hasilnya menjadi basis berpijak dalam melakukan intervensi penanganan masalah sosial. Pendataan yang dilakukan antara lain KSJPS (Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial), PBI JK (Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial).

b. Pemberdayaan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)

Kegiatan ini melakukan pemberdayaan PSKS, antara lain melalui pelatihan, penyuluhan dan pembinaan bagi PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), Karang Taruna, LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial).

Kedua kegiatan diatas dapat terealisasi 100 %.

Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2020

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

: DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																						
NAMA SKPD																						
No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penang ggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuan gan	Fisik	Keuan gan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2020		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2020		Fi sik	Ke ua ng an	Fisik	Keua ngan		
									Fisik	Keuan gan	Fisik	Keuan gan	Fisik	Keuan gan	Fisik	Keua ngan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=1 4/10	17=1 5/11	18 = 8 + 14	19 =9 +1 5	20=1 8/6	21=1 9/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan administrasi perkantoran lancar/Jumlah seluruh layanan administrasi perkantoran) x 100%	100%	2.316. 182.19 0	100%	1.445. 899.75 3	100%	1.372. 313.38 8	100, 00%	1.372.313 .388	100,00 %	1.355.076. 067	100, 00%	98,74 %					Sekret ariat	
		1 Penyed iaan				574.87 3.155		221.53 4.709		99.960 .000	100, 00%	99.960.00 0	100,00 %	98.471.110	100, 00%	98,51 %			0,00 %	0,00 %		

		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1. Rapat koordinasi yang terselenggara	48 kali		48 kali		68 kali		100,00%		100,00%			0		0,00%				
			2. Laporan perjalanan dinas	19 laporan		19 laporan		65 laporan		100,00%		100,00%									
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.741.309.035		1.224.365.044		1.272.353.388		100,02%		100,02%			1.256.604.957	98,76%		0,00%	0,00%	Ada pengalihan anggaran untuk pencegahan CORONA untuk pembelian: Handsanitizer, Masker, Desinfektan, Botol Semprot.
			1. Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis		50 jenis		50 jenis		100,00%		100,00%			0		0,00%				
			2. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis		10 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%									
			3. Surat dinas yang terkelola	2950 buah		2750 buah		2750 buah		100,00%		100,00%									
			4. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 jenis		13 jenis		13 jenis		100,00%		100,00%									
			5. Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	12 jenis		12 jenis		12 jenis		100,00%		100,00%									

		6. Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis	4 jenis	3 jenis	100,00%	100,00%	100,00%																					
		7. STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	59 unit	59 unit	59 unit	100,00%	100,00%	100,00%																					
		8. Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	100,00%	100,00%																					
		9. Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	4 kali	4 kali	4 kali	100,00%	100,00%	100,00%																					
		10. Jasa percetakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00%	100,00%	100,00%																					
		11. Jasa penggandaan	##### ##### #	##### ##### #	##### ##### ##	100,00%	100,00%	100,00%																					
		12. Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	100,00%	100,00%																					
		13. Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	100,00%	100,00%																					
		14. Buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 jenis	3 jenis	4 jenis	100,00%	100,00%	100,00%																					
Rata-rata capaian kinerja																		100,00%	98,64%			0,00%	0,00%						
Predikat kinerja																								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah

		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penguasaan dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	9 dokumen	68.386.348	9 dokumen	33.510.000	6 dokumen	12.500.000	100,00%	12.500.000	100,00%	12.275.000	100,00%	98,20%	0	0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	98,20%		0,00%	0,00%			
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah			

Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Rerata persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga	85%	5.981.538.920	88%	4.671.430.784	84%	3.703.611.879	84,00%	3.703.611.879	87,25%	3.469.580.890	103,87%	93,68%						Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
---------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	--------	---------------	--------	---------------	---------	--------	--	--	--	--	--	----------------------------------------

		1	Perlindungan Sosial			1.002.887.285	640.882.553	225.083.600	225.083.600	186.592.014	82,90%							Ada pengalihan anggaran untuk pencegahan CORON A untuk pembelian: Handsanitizer, Obat-obatan, Masker, Sarung Tangan, Sabun Cair, Mie Instan, Air Mineral, Kernet Sapi, Sosis, Buryam
			1. Laporan Penyaluran Bantuan Korban Bencana	1 laporan	1 laporan			100,00%	100,00%		100,00%		0		0,00%			
			2. Pembinaan Komisi Daerah Lansia	15 kali	15 kali		1 kali	100,00%	100,00%		100,00%							
		2	Pengelolaan Jamina dan Bantuan Sosial			1.168.468.585	1.302.627.768	620.929.000	620.929.000	589.226.887	94,89%				0,00%	0,00%		
			1. Lanjut usia miskin yang memperoleh bantuan sosial	0 orang	0 orang		4641 orang	100,00%	100,00%		100,00%		0		0,00%			
			2. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	17634 KPM	13134 KPM		12063 KPM	100,00%	100,00%		100,00%							

			3. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)		12716 KPM		11455 KPM		11068 KPM		100,00%		100,00%		100,00%													
			4. Dokumen Pelayanan Santunan Kematian bagi Keluarga yang Memiliki KMS		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%													
			5. Jasa Pelayanan Pemakaman		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%													
			6. Dokumen Penanganan Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal dalam perjalanan di Kota Yogyakarta		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%													
		3	Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo			1.480.607.069		1.047.636.980		1.118.914.400	100,00%	1.118.914.400	100,00%	985.122.733	100,00%	88,04%		0,00%	0,00%									
			Anak Terlantar yang Dilayani		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%		0		0,00%									
		4	Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma			2.329.575.981		1.680.283.483		1.738.684.879	100,00%	1.738.684.879	100,00%	1.708.639.255	100,00%	98,27%		0,00%	0,00%									
			Lanjut usia terlantar yang dilayani		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%		0		0,00%									
Rata-rata capaian kinerja																					100,00%	91,03%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Rerata persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial secara individu maupun kelompok/keluarga	87%	2.465.381.431	90%	1.722.002.938	83%	752.564.500	77,00%	752.564.500	78,10%	751.758.400	101,43%	99,89%					Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial
		1 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				639.837.142		453.014.992		158.318.500	100,00%	158.318.500	100,00%	158.260.903	100,00%	99,96%			0,00%	0,00%	
		1. Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha			55 orang		55 orang		0 orang		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%	
		2. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha serta pengantaran ke RSJ			95 orang		95 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		3. Klien Masyarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha			40 orang		25 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%						

			5. Warga rentan hidup di jalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelatihan keterampilan	20 orang	20 orang	0 orang	100,00%	100,00%	100,00%									
			6. Laporan Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%									
			8. ODHA yang mengikuti Penguatan Sosial Psikologis	20 orang	20 orang	0 orang	100,00%	100,00%	100,00%									
			9. Masyarakat yang mengikuti workshop HIV/AIDS	60 orang	60 orang	60 orang	100,00%	100,00%	100,00%									
			10. Masyarakat yang mengikuti workshop stop pasung	150 orang	150 orang	150 orang	100,00%	100,00%	100,00%									
			11. Temu Anak Terlantar, Anak Jalanan dan Keluarga	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%									
		2	Advokasi dan Penda mpingan Penyandang Masalah Kesejahteraan															
					1.825.544.289	1.268.987.946	594.246.000	100,00%	594.246.000	100,00%	593.497.497	100,00%	99,87%			0,00%	0,00%	
			1. Dokumen Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%					0		0,00%		

		Sosial (PMKS)	2. Penyandang Disabilitas yang menerima bantuan Alat Bantu	13 orang	6 orang	13 orang	100,00%	100,00%	100,00%																		
			3. Dokumen Advokasi dan Surat Rekomendasi bagi PMKS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%																		
			4. Dokumen Pendampingan dan Penanganan Anak Terlantar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%																		
			5. Dokumen Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%																		
			6. Dokumen Pembinaan dan Pendampingan KUBE dan USEP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%																		
Rata-rata capaian kinerja																			100,00%	99,92%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Rerata persentase PMKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring	90%	0	89%	0	89%	1.055.396.440	87,34%	1.055.396.440	87,50%	1.044.767.243	100,18%	98,99%							Bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial
----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	------------	----------	------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------

		1	Pendataan PMKS dan PSKS						685.939.440	100,01%	685.939.440	100,01%	682.104.929	100,00%	99,44%			0,00%	0,00%		
			1. Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				100,00%		100,00%	100,00%	100,00%			0		0,00%		
			2. Data base PSKS dan PMKS	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen				100,00%		100,00%	100,00%	100,00%							
			3. Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				100,00%		100,00%	100,00%	100,00%							
			4. Data base BDT	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				100,00%		100,00%	100,00%	100,00%							
			5. Data base Penyandang Disabilitas	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen				100,00%		100,00%	100,00%	100,00%							
			6. Data Pelayanan Aduan Sosial Terpadu dan Terintegrasi JSS	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen				100,00%		100,00%	100,00%	100,00%							
		2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial						369.457.000	100,00%	369.457.000	100,00%	362.662.314	100,00%	98,16%			0,00%	0,00%		
			1. Pelatihan Bimbingan Sosial Dasar dan Bimbingan Sosial Lanjut bagi Pekerja Sosial Masyarakat	2 kali	2 kali	2 kali				100,00%		100,00%	100,00%	100,00%			0		0,00%		
			3. Peringatan HKSN	1 kali	1 kali	1 kali				100,00%		100,00%	100,00%	100,00%							
			5. Optimalisasi PSKS	5 kali	5 kali	5 kali				100,00%		100,00%	100,00%	100,00%							
			6. Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan	1 kali	1 kali	1 kali				100,00%		100,00%	100,00%	100,00%							

		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan administrasi perkantoran lancar/Jumlah seluruh layanan administrasi perkantoran) x 100%	100%	2.316.182.190	100%	1.346.189.065	100%	1.658.437.525	100,00 %	1.658.437.525	100,00%	1.445.899.753	100,00 %	87,18%			Sekretariat
		1 Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				574.873.155		288.643.530		315.330.000	100,00 %	315.330.000	100,00%	221.534.709	100,00 %	70,25%	0,00%	0,00%	
			- Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi		48 kali		48 kali		48 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0,00%	
			- Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		19 laporan		19 laporan		19 laporan		100,00%		100,00%		100,00%				
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.741.309.085		1.057.545.535		1.343.107.525	100,01 %	1.343.107.525	99,91%	1.224.365.044	99,93%	91,16%	0,00%	0,00%	
			Materai 6000		1050 buah		1050 buah		1050 buah		100,00%		100,00%		100,00%			0,00%	
			Materai 3000		1950 buah		1950 buah		1950 buah		100,00%		100,00%		100,00%				
			Jasa pengiriman/paket		10075 paket		10075 paket		10075 paket		100,00%		100,00%		100,00%				
			STNK Boda 4 yang terbayar		18 unit		18 unit		18 unit		100,00%		96,00%		96,00%				
			STNK Boda 3 yang terbayar		1 unit		1 unit		1 unit		100,00%		67,00%		67,00%				
			STNK Boda 2 yang terbayar		40 unit		40 unit		40 unit		100,00%		100,00%		100,00%				
			Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia		13 Jenis		13 Jenis		13 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
			Jasa Kebersihan Kantor		1 tahun		1 tahun		1 tahun		100,00%		100,00%		100,00%				
			Alat Tulis Kantor yang tersedia		50 jenis		50 jenis		50 jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
			Jasa Percetakan		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
			Jasa Penggandaan		230000 lembar		230000 lembar		230000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%				
			Komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia		10 jenis		10 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%				

		Jasa Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	100,00%	100,00%											
		Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00%	100,00%	100,00%											
		Buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100,00%	100,00%	100,00%											
		Jasa perbaikan perlengkapan kerja	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00%	100,00%	100,00%											
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100,00%	100,00%	100,00%											
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali	4 kali	4 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
Rata-rata capaian kinerja														99,96%	80,71%	0,00%	0,00%		
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang memadai	(Jumlah sarana dan prasarana yang memadai/Jumlah seluruh sarana dan prasarana) x 100%	100%	1.143.774,088	100%	528.574,488	100%	922.788,400	100,00%	922.788,400	100,00%	753.687,596	100,00%	81,68%			Sekretariat
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung / bangunan Kantor		12 bulan	317.461,154	12 bulan	194.038,400	10 bulan	420.280,000	100,00%	420.280,000	100,00%	415.795,175	100,00%	98,93%	0,00%	0,00%	
		2 Pemeliharaan				826.312,934		334.536,088		502.508,400	99,99%	502.508,400	99,99%	337.892,421	100,00%	67,24%	0,00%	0,00%	

		Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Roda 4	18 unit		18 unit		18 unit		100,00%		100,00%		100,00%			0,00%		
			2. Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Roda 3	1 unit		1 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%					
			3. Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Roda 2	40 unit		40 unit		40 unit		100,00%		100,00%		100,00%					
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	83,09%	0,00%	0,00%		
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	(Peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan/ seluruh laporan capaian kinerja dan keuangan) x 100 %	100%	68.386.348	100%	24.828.000	100%	36.160.000	100,00 %	36.160.000	100,00%	33.510.000	100,00 %	91,91%			Sekretariat
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				68.386.348		24.828.000		36.160.000	100,00 %	36.160.000	100,00%	33.510.000	100,00 %	91,91%	0,00%	0,00%	
			1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Review Renstra, Renja, PK, BKA, DPA)		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0,00%	
			2. Laporan Kinerja OPD (LKP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, Profil)		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	91,91%	0,00%	0,00%		
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Rerata persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga	85%	5.981.538.920	86%	60.800.579.373	82%	4.977.001.525	82,00%	4.977.001.525	87,97	4.671.430.785	107,28 %	93,86%			Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1 - Perlindungan Sosial				1.002.887.285		57.766.676.353		741.565.000	100,01 %	741.565.000	100,01%	640.882.553	100,00 %	86,42%	0,00%	0,00%	
			- Gelar Potensi Anak Panti Asuhan se- Kota Yogyakarta		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0,00%	
			- Dokumen Hasil Evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
			- Jasa piket Tagana		365 hari		365 hari		365 hari		100,00%		100,00%		100,00%				
			- Jumlah Kelompok Lanjut Usia Potensial yang mengikuti Desiminasi Informasi dan Pengetahuan		8 kelompok		8 kelompok		8 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%				
			- Workshop UEP Lanjut Usia Potensial		2 kali		2 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%				
			- Gelar Potensi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional Kota Yogyakarta		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%				
			- Workshop Komisi Daerah Lansia		15 kali		15 kali		15 kali		100,00%		100,00%		100,00%				
			- Peningkatan Kapasitas Tagana, KSB dan Komunitas		3 kali		3 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%				

			- Dokumen seleksi penghuni Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma dan Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
			- Workshop Petopor Perdamaian		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%					
		2	Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial			1.168.468,583		796.415,377		1.353.188.000	100,00 %	1.353.188.000	100,00%	1.302.627,768	100,00 %	96,26%	0,00%	0,00%		
			- Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan sosial lanjut usia terfatar		4 kali		3 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0,00%		
			- Frekuensi fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)		12 kali		12 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%					
			- Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)		4 kali		4 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%					
			- Dokumen pelayanan Santunan Kematian bagi keluarga yang memiliki KMS		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
			- Jasa Pelayanan Mobil Jenazah		12 kali		12 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%					
			- Dokumen Jenazah terfatar yang dimakamkan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					

			- Dokumen Penanganan Orang Terfantar yang kehilangan bekal dalam perjalanan di Kota Yogyakarta		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	100,00%		100,00%		100,00%						
		3	Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo			1.480.607,069		837.737,220		1.142,744.000	100,00%	1.142.744.000	100,00%	1.047,636.980	100,00%	91,68%	0,00%	0,00%		
			Anak terfantar yang dilayani		12 bulan		12 bulan	12 bulan		100,00%		100,00%	100,00%					0,00%		
		4	Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma			2.329.575,981		1.399.750,423		1.739,504.525	100,00%	1.739.504.525	100,00%	1.680,283.483	100,00%	96,60%	0,00%	0,00%		
			Lanjut usia terfantar yang dilayani		12 bulan		12 bulan	12 bulan		100,00%		100,00%	100,00%					0,00%		
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	92,74%	0,00%	0,00%			
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah			

	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Rerata persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial secara individu maupun kelompok/keluarga	87%	2.465.381,431	89%	39.459.583,257	77%	1.753.820,000	77,00%	1.753.820.000	89,59	1.722,002.939	116,35%	98,19%			Advokasi dan Rehabilitasi Sosial
		1	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			639.837,142		38.326,436,351		455.504,000	99,99%	455.504.000	99,99%	453,014,992	100,00%	99,45%	0,00%	0,00%	
			1. Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha		55 orang		55 orang	55 orang		100,00%		100,00%	100,00%					0,00%	

		2. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha serta pengantaran ke BSJ	95 orang	85 orang	95 orang	100,00%	100,00%	100,00%				
		3. Klien Pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha	40 orang	40 orang	25 orang	100,00%	100,00%	100,00%				
		4. Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	40 orang	40 orang	40 orang	100,00%	100,00%	100,00%				
		5. Anak rentan hidup di jalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha	20 orang	20 orang	20 orang	100,00%	100,00%	100,00%				
		6. Dokumen Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%				
		7. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mengikuti pelatihan	20 orang	20 orang	20 orang	100,00%	100,00%	100,00%				
		8. ODBA yang mengikuti Penguatan Sosial Psikologis	20 orang	20 orang	20 orang	100,00%	100,00%	100,00%				

			9. Masyarakat yang mengikuti workshop HIV/AIDS		60 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
			10. Masyarakat yang mengikuti workshop stop pasung		150 orang		0 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00%				
			11. Sosialisasi Temu Anak Terlantar dan Keluarga		4 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%				
			12. Sosialisasi Temu Anak Jalanan dan Keluarga		4 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%				
		2	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS)			1.825.544.289		1.133.146.906		1.298.316.000	99,99%	1.298.316.000	99,99%	1.268.987.946	100,00%	97,74%	0,00%	0,00%	
			Dokumen Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0,00%	
			Dokumen penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
			Dokumen advokasi dan surat rekomendasi bagi PMKS		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
			Dokumen penanganan dan rekomendasi anak terlantar		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
			Dokumen pembinaan dan pendampingan KUBE dan ISEP		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
			Peringatan Hari Disabilitas Internasional		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%				

			Dokumen Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengsuhan Anak) bagi IKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
			Buku KUBE yang tersusun		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja															100,00 %	98,60%	0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah			

	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Program Bata, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Rerata persentase PMKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring	90%	3.204.669,386	86%	2.320.229,848	88%	2.361.993,000	88,00%	2.361.993.000	88,61	2.307.100,905	100,69 %	97,68%			Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial
		1 Pendataan PMKS dan PSKS				1.928.522,303		1.585.287,849		1.401.961,000	100,01 %	1.401.961.000	100,01%	1.363.522,729	100,00 %	97,26%	0,00%	0,00%	
			Bata base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0,00%	
			Bata base PSKS		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
			Bata base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%				
		2 Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)				1.276.147,083		734.941,999		960.032,000	100,01 %	960.032.000	100,01%	943.578,176	100,00 %	98,29%	0,00%	0,00%	
			1. Pelatihan Bimbingan Sosial Basar dan Bimbingan Sosial Lanjut bagi Pekerja Sosial Masyarakat		2 kali		22 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0,00%	

		2. Pelatihan bagi Pengurus Karang Taruna	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%		100,00%	100,00%						
		3. Sunatan Massal HSN bagi anak tidak mampu	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%		100,00%	100,00%						
		4. Jenis seleksi PSKS berprestasi	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%		100,00%	100,00%						
		5. Optimalisasi PSKS	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100,00%		100,00%	100,00%						
		6. Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial	2 kali	2 kali	2 kali	100,00%		100,00%	100,00%						
		7. Dokumen Pendampingan IOTA Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%		100,00%	100,00%						
		8. Sarasehan Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%		100,00%	100,00%						
Rata-rata capaian kinerja										100,00%	97,77%	0,00%	0,00%		
Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Total anggaran dari seluruh program						11.710.500,450		11.710.500,450		10.933.631,977					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)										99,99%	93,37%	0,00%	0,00%		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun lalu dibatasi secara khusus pada program dan kegiatan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang dapat dilihat pada Tabel 2.1.b, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Program ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja program, yaitu persentase penempatan pekerja dan persentase penempatan transmigran. Persentase penempatan pekerja tahun 2020 terealisasi sebesar 100%. Terkait kegiatan penempatan transmigran tahun 2020 capaiannya sebesar 100% untuk pelatihan dan pemberian KIE terhadap target 10 KK. Namun terdapat kebijakan pusat yang menunda keberangkatan calon transmigran tersebut dikarenakan pandemi Covid-19, sehingga dilakukan review untuk perubahan target menjadi 0%. Terdapat 3 (tiga) kegiatan dalam program ini dimana tingkat realisasi kerjanya mencapai 100%. Tiga kegiatan tersebut adalah:

- a.1. Kegiatan Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja. Kegiatan ini berisi pencari kerja yang mendapat pelatihan ketrampilan dan Lembaga Pelatihan kerja yang dibina. Seluruh kegiatan tersebut secara fisik telah selesai dilaksanakan 100%.
- a.2. Kegiatan Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja. Tingkat realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%. Beberapa sub kegiatan di dalamnya antara lain: Tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja, Forum Bursa Kerja Khusus (BKK), Pameran Bursa Kerja (Job Fair), Data Penganggur Kota Yogyakarta yang Tersedia, Tenaga Kerja Mandiri dan tenaga kerja lokal yang mengikuti padat karya, Diseminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA.
- a.3. Kegiatan Penempatan Transmigrasi. Kegiatan ini terdiri dari Calon Transmigran Terampil Pra PDU Pertanian dan KIE Ketransmigrasian. Target fisik renja sebesar 100%, telah berhasil direalisasikan sebesar 100% pada Tahun 2020.

b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

Indikator kinerja dari program ini adalah persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial. Tahun 2020 terdapat 2 (dua) kegiatan di dalam program ini, di mana realisasi fisik maupun keuangannya juga sangat tinggi.

b.1. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan.

Kegiatan ini antara lain berupa Fasilitasi Dewan Pengupahan, KIE dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja, Diseminasi Upah Minimum Kota, Promosi dan Publikasi Kesejahteraan Pekerja. Kegiatan tersebut di atas telah dilaksanakan dengan tingkat realisasi fisik sebesar 100%.

b.2. Kegiatan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Kegiatan yang dilakukan meliputi Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan, Perusahaan yang mengikuti Deteksi Dini Ketenagakerjaan, Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah, Verifikasi SP/SB. Realisasi fisik kegiatan ini di tahun 2020 mencapai 100%.

Realisasi kinerja program sesuai bahkan melebihi target pada perencanaan disebabkan beberapa faktor:

- Perencanaan yang cukup baik. Penentuan target yang cukup realistis untuk dapat dicapai dengan mempertimbangkan faktor- faktor yang mempengaruhi dan dinamikanya.
- Dukungan maupun kerjasama yang baik antara personil Dinas Kopukmnakertans, masyarakat, perusahaan, maupun instansi terkait lainnya dalam mendukung program dan kegiatan yang ada.
- Anggaran yang cukup

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk penyempurnaan performa kerja organisasi dimasa mendatang antara lain:

- Perlu lebih cermat lagi dalam perencanaan, terutama mengenai hal- hal yang sulit diprediksikan karena keterkaitan dengan faktor- faktor dari luar
- Pengelolaan basis data yang baik, sehingga kegiatan perencanaan akan selalu didukung dan didasarkan dengan data yang akurat.

Tabel 2.1.b Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

NAMA SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 =14/10	17=15/11	18 =8+14	19=9+15	20=18/6	21 =19/7	22	23		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/jumlah kegiatan x 100%	100%	1.648.148.354	100%	1.792.521.973	100%	830.893.000	100,00%	830.893.000	100,00%	825.562.402	100,00%	99,36%					Sekretaris Dinas			
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				462.338.635		916.285.373		87.686.000	100,00%	87.686.000	100,00%	87.386.369	100,00%	99,66%			0,00%	0,00%				
			Rapat Koordinasi yang terselenggara		79 kali		46 kali		19 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%				
			Laporan Perjalanan Dinas		149 laporan		123 laporan		13 laporan		100,00%		100,00%		100,00%									

		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.185.809.719	876.236.600	743.207.000	99,97%	743.207.000	99,97%	738.176.033	100,00%	99,32%			0,00%	0,00%		
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	89 jenis	90 jenis		59 jenis	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		0		0,00%			
		Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	11 jenis	15 jenis		4 jenis	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%							
		Surat Dinas yang terkelola	0 buah	0 buah		75 buah	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%							
		Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	5 orang	4 orang		7 orang	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%							
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	18 jenis	22 jenis		13 jenis	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%							
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga yang tersedia	5 jenis	5 jenis		17 jenis	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%							
		Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan	12 bulan		12 bulan	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%							
		Bahan Bacaan / Surat Kabar yang tersedia	5 jenis	2 jenis		3 jenis	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%							
		STNK Kendaraan Dinas yang diperpanjang izinnya	29 unit	30 unit		30 unit	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%							
		Jasa Percetakan	3 jenis	12 jenis		9 jenis	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%							
		Jasa Penggandaan	43100 lembar	31000 lembar		72970 lembar	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%							

Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	(jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan)x100%	100%	166.969.633	100%	10.492.600	100%	1.953.000	100,00%	1.953.000	100,00%	1.953.000	100,00%	100,00%				Sekretaris Dinas
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja, Keuangan dan SDM			166.969.633		10.492.600		1.953.000	100,00%	1.953.000	100,00%	1.953.000	100,00%			0,00%	0,00%	
					8 Dokumen		10 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%				0		0,00%	
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	100,00%	0,00%	0,00%			
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah			

	Angka pengangguran menurun	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase penempatan pekerja	((jumlah pekerja yang ditempatkan)/jumlah lowongan terdaftar)x100%	70%	4.082.347.242	64%	4.141.296.089	67%	1.382.256.000	66,67%	1.382.256.000	66,57%	1.360.561.194	99,85%	98,43%				Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Pelatihan Produktivita				2.700.654.757		2.474.496.717		488.093.000	100,00%	488.093.000	100,00%	486.904.414	100,00%	99,76%			0,00%	

			Pencari Kerja yang mendapat pelatihan ketrampilan	580 orang	579 orang	60 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0	0,00%		
			Lembaga Pelatihan kerja yang dibina	20 LPK	20 LPK	10 LPK	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
	2	Pembi naan dan Pene mpatan Tenaga Kerja		1.381.692.485	1.666.799.372	894.163.000	100,00%	894.163.000	100,00%	873.656.780	100,00%	97,71%	0	0,00%			
			Tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja	1400 orang	1050 orang	500 orang	100,00%		100,00%		100,00%		0	0,00%			
			Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)	4 kali	4 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%						
			Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%						
			Data Penganggur Kota Yogyakarta yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		100,00%		100,00%						
			Tenaga Kerja Mandiri dan tenaga kerja lokal yang mengikuti padat karya	168 orang	396 orang	184 orang	100,00%		100,00%		100,00%						
			Diseminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA	0 Perusahaan	0 Perusahaan	50 Perusahaan	100,00%		100,00%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja												100,00%	98,73%		0,00%	0,00%	
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Kesejahteraan Tenaga Kerja Meningkat	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai hubungan industrial	(jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial/jumlah perusahaan)x 100%	38%	813.144.465	36%	979.146.160	36%	370.327.000	36,47%	370.327.000	42,59%	367.797.780	116,78%	99,32%				Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial								
	1 Pembiayaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan				332.441.540		471.384.310		180.420.000	99,99%	180.420.000	99,99%	177.967.780	100,00%	98,64%			0,00%									
		Fasilitasi Dewan Pengupahan		4 laporan		4 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%								
		KIE dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja		6 jenis		6 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%					0,00%								
		Diseminasi Upah Minimum Kota		200 perusahaan		300 perusahaan		140 perusahaan		100,00%		100,00%		100,00%					0,00%								
		Promosi dan Publikasi Kesejahteraan Pekerja		4 jenis		4 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%					0,00%								
	2 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja				480.702.925		507.761.850		189.907.000	100,00%	189.907.000	100,00%	189.830.000	100,00%	99,96%			0,00%									
		Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan.		100 Perusahaan		75 Perusahaan		55 Perusahaan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%								
		Perusahaan yang mengikuti Deteksi Dini Ketenagakerjaan		24 Perusahaan		24 Perusahaan		15 Perusahaan		100,00%		100,00%		100,00%					0,00%								
		Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah		3 Kesepakatan		3 Kesepakatan		3 Kesepakatan		100,00%		100,00%		100,00%					0,00%								
		Verifikasi SP/SB.		1 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					0,00%								
Rata-rata capaian kinerja																		100,00%	99,30%			0,00%					
Predikat kinerja																								Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

		Klinik Koperasi Sehat (KKS)	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100,00%	100,00%	100,00%													
		Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP	1 kali	1 kali	0 kali	100,00%	100,00%	100,00%													
		Gelar Produk Koperasi	2 kali	2 kali	0 kali	100,00%	100,00%	100,00%													
Rata-rata capaian kinerja																	100,00%	98,92%		0,00%	0,00%
Predikat kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM Meningkatkan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Nilai Omset Usaha Kecil Mikro (UKM)	Nilai omset Usaha Kecil Mikro (UKM) di tahun n	7792465 Rp000	2.567.287.847	7368768 Rp000	4.418.319.303	2300864 Rp000	904.628.800	2300864,31%	904.628.800	3795713,38%	887.053.351	164,97%	98,06%					Kepala Bidang Usaha Mikro
	1 Kemitraan dan Pembiayaan UMK				1.156.777.632		900.503.600		238.845.800	100,01%	238.845.800	100,01%	237.289.151	100,00%	99,35%			0,00%	0,00%	
		Izin Usaha Mikro (IUM) (yang dimonev)		14 kecamatan		14 kecamatan		14 kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%	
		Pameran dan promosi produk UMK		5 kali		7 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
		Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak		6 kali		4 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						

Evaluasi atas capaian kinerja layanan organisasi termuat dalam Tabel 2.2. Dari tabel tersebut tampak bahwa target yang ditetapkan tahun 2020 tercapai. Diawal tahun 2019 ditetapkan target indikator kinerja urusan sosial yakni Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 82,30. Realisasi indikator ini sebesar 88,64. Pada urusan tenaga kerja, terdapat dua indikator kinerja yakni Persentase Penempatan Tenaga Kerja dan Persentase Perusahaan yang mempunyai sarana prasarana hubungan industrial. Target indikator Persentase Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2019 sebesar 64,15 % dan terealisasi sesuai dengan target. Persentase Perusahaan yang mempunyai sarana prasarana hubungan industrial ditargetkan sebesar 35,76 % dan terealisasi sebesar 35,88 % atau tingkat realisasi 100,33 %. Target kinerja urusan transmigrasi yakni Persentase Penempatan Transmigran yang ditetapkan sebesar 100 % juga dapat dicapai sesuai target pada akhir tahun 2019.

Pada awal tahun 2020, indikator kinerja urusan sosial ditetapkan target Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 85,20. Pertengahan tahun 2020 dilakukan Review Renstra dengan menentukan target yang lebih rendah dari sebelumnya (82,90). Demikian juga dengan indikator kinerja urusan tenaga kerja dan transmigrasi. Indikator Persentase Penempatan Tenaga Kerja ditargetkan menjadi 66,67 % dan target Persentase Perusahaan yang Mempunyai Sarana Prasarana Hubungan Industrial menjadi 36,47 %. Sedangkan urusan transmigrasi target Persentase penempatan Transmigran menjadi 0 %. Penentuan ini dilatarbelakangi pandemi COVID 19 yang melanda Indonesia secara masif. Berbagai sendi kehidupan melemah, bahkan lumpuh. Khusus urusan transmigrasi, perubahan rencana target juga dipengaruhi oleh ditiadakannya program penempatan transmigrasi ditingkat nasional. Oleh karenanya rasionalisasi terhadap target kinerja organisasi perlu dilakukan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	2019	2020	Th 2021	Th 2022	
				6	7	8	9	10	12		13	14	15
Sosial													
1	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial		77	77	82,30	82,90	86,36	87,85	88,64	83,33	86,36	87,85	Diperkirakan target dapat tercapai mengingat komitmen kuat kepala daerah untuk mewujudkan visi-misi, dan apabila tidak terjadi bencana yang berdampak pada refocusing anggaran.

2	Persentase kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
3	Persentase kebutuhan dasar anak terlantar diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4	Persentase kebutuhan dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,60%	100,00%	100,00%	100,00%	
5	Persentase kebutuhan dasar lanjut gelandangan dan pengemis diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut gelandangan dan pengemis diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
6	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Tenaga Kerja dan Transmigrasi													
1	Persentase penempatan tenaga kerja	-		62,50%	64,15%	66,67%	68,00%	70,00%	64,15%	66,57%	68,00%	70,00%	
2	Persentase penempatan transmigran			100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
3	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial			34,85%	35,76%	36,47%	37,06%	37,97%	35,88%	42,59%	42,60%	42,61%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2 lampiran dokumen ini menunjukkan capaian kinerja Dinas Sosial dan urusan tenaga kerja dan transmigrasi pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang relatif baik walaupun pada aspek penempatan kinerja dan transmigran kurang maksimal pencapaian targetnya. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada kebijakan refocusing anggaran dan kebijakan pusat yang meniadakan penempatan transmigran di tahun 2020.

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor internal yang mendukung keberhasilan capaian kinerja urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi antara lain :

- a. Kepatuhan pada perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
- b. Kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai unit kerja;
- c. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar operasional yang jelas;
- d. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja secara berkala.

Sedangkan faktor eksternal yang mendukung keberhasilan kinerja tersebut antara lain:

- a. Adanya kebijakan dan keberpihakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
- b. Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait
- c. Pemanfaatan jejaring kerja daerah dan nasional secara optimal

Meskipun faktor-faktor diatas berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi, bukan berarti pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial maupun Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjalan tanpa hambatan. Hambatan yang ditemui antara lain meliputi:

- a. Urusan Sosial :
 - Perbedaan kebijakan dan sistem yang berlaku pada lembaga mitra berdampak pada responsivitas lembaga tersebut dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Permasalahan sosial yang bersifat dinamis dan tidak dapat diperkirakan/diprediksi secara pasti menyulitkan rencana intervensi penyelesaian masalah kesejahteraan sosial.
 - Refocusing anggaran menyebabkan beberapa indikator Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang telah direncanakan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
- b. Urusan tenaga kerja dan transmigrasi :
 - Terbatasnya minat pencari kerja hanya pada jenis-jenis pelatihan tertentu saja.
 - Informasi terkait pelatihan belum secara luas menjangkau masyarakat walaupun publikasinya sudah terintegrasi dalam JSS.
 - Masyarakat terlalu selektif dalam memilih pekerjaan terkait dengan lokasi maupun jenis pekerjaan. Lokasi yang dekat dan jenis pekerjaan di dalam kantor lebih diminati masyarakat.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kondisi yang perlu mendapat perhatian terkait dengan kesejahteraan sosial adalah penduduk yang mengalami kerentanan sebagai akibat dari permasalahan fisik/disabilitas, ketidakberdayaan karena usia gender dan sosial, ketiadaan kesempatan untuk melakukan investasi diri, kejadian bencana, eksploitasi serta guncangan ekonomi akibat bencana. Kelompok penduduk ini meliputi penyandang disabilitas, anak, perempuan, lanjut usia

dan korban bencana, serta penduduk miskin dan rentan produktif yang terkendala kerentanan tertentu.

Permasalahan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas diantaranya terkait dengan penyediaan infrastruktur, aksesibilitas dan tenaga pendamping yang kompeten. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, di Kota Yogyakarta dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tugas Komite ini adalah melakukan fasilitasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, juga melaksanakan mediasi dan advokasi antara penyandang disabilitas dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan umum baik di daerah maupun tingkat nasional. Terjadinya pandemi COVID 19 secara meluas membuat masalah kemiskinan menjadi lebih berat. Pandemi ini telah meruntuhkan berbagai sendi kehidupan, terutama bidang ekonomi. Hal ini memperburuk kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat rentan dan marjinal, bahkan kelompok masyarakat yang mampu tingkat sosial ekonominya pun dapat turun secara drastis. Akibatnya jumlah penduduk miskin dan rentan bertambah.

Hal mendasar yang perlu dipastikan dalam menangani kemiskinan dan kerentanan adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Bagi masyarakat yang tidak atau kurang potensial, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dapat diintervensi melalui aktivitas pemberian bantuan sosial. Aktivitas pemberian bantuan ini merupakan perwujudan perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. Dengan bertambahnya jumlah masyarakat miskin dan rentan, maka sasaran penerima manfaat perlu diperluas. Berkaitan dengan pemberian bantuan sosial, basis data menjadi sangat krusial. Oleh karena diperlukan pencermatan dan verifikasi validasi data yang optimal dalam penentuan keluarga penerima manfaat/penerima bantuan sosial.

Adapun untuk masyarakat yang potensial, diintervensi melalui aktivitas yang bersifat memberdayakan. Intervensi program ini bertujuan membangun kesadaran untuk mendorong kemandirian dan akses keluar dari kemiskinan dan atau kerentanan. Pemberian bantuan untuk mengatasi

permasalahan secara terus menerus di satu sisi justru dapat melemahkan daya juang masyarakat.

Pada Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, masalah yang dihadapi adalah meningkatnya tingkat pengangguran terbuka akibat pandemi Covid-19. Selain itu masih banyaknya pencari kerja yang perlu dibekali dengan ketrampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Seiring dengan hal tersebut diperlukan penambahan kuota untuk pemagangan sehingga pasca pelatihan teknis peserta dapat lanjut mengikuti program pemagangan untuk mengimplementasikan ketrampilan yang telah diperoleh dari pelatihan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan program pemagangan mampu mendorong peserta pelatihan untuk segera mendapatkan pekerjaan (mempercepat penempatan).

Dalam hal mekanisme pendaftaran pelatihan, perlu dibuka pendaftaran secara online untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran pelatihan sehingga tidak terjadi antrean panjang di tempat pendaftaran dan tidak terjadi kerumunan sebagai salah satu manifestasi protokol kesehatan pandemi Covid-19.

Isu ketenagakerjaan lainnya adalah perlu adanya sosialisasi intensif terkait penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD, dan AKAN, penyuluhan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan. Diharapkan pencari kerja siap memasuki dunia kerja, baik sebagai pekerja di suatu perusahaan maupun bekerja secara mandiri dengan menciptakan lapangan usaha sendiri.

Dalam rangka mendukung program transmigrasi, para calon transmigran dididik, dilatih dan dibekali agar “siap” baik secara fisik, psikis maupun kapasitas personalnya untuk ditempatkan di daerah tujuan. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi serta upaya penyelesaian permasalahan transmigran pasca penempatan juga perlu dilakukan secara optimal untuk meminimalisasi kegagalan transmigran di daerah penempatan.

Beberapa kegiatan pada Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial dilaksanakan dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0, dimana akan berdampak pada perubahan relasi hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja. Workshop teknis bernegosiasi bagi Serikat Pekerja (SP) dalam membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antar SP dan pengusaha, dengan tujuan agar SP mempunyai kekuatan dalam melakukan dialog sosial. Bimtek penyusunan PKB bagi SP dan Pengusaha. Pembinaan masih terus dilakukan terkait dengan perlindungan

dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Pembinaan tersebut meliputi sosialisasi regulasi ketenagakerjaan, diseminasi Upah Minimum Kota (UMK), menindaklanjuti pengaduan tenaga kerja, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hubungan kerja di perusahaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Review Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2017-2022. Dokumen Review Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2017-2022 menjadi dasar penyusunan Renja Tahun 2021. Rancangan Renja Tahun 2022 dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2021 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022.

Rancangan Renja selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang mengakomodir hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel 2.3.

Penyusunan program kerja tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemberlakuan produk hukum ini berimplikasi pada struktur program kerja dan penganggaran perangkat daerah. Pada urusan sosial, klasifikasi program kegiatan telah selaras dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Sosial sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, program kerja yang telah direncanakan telah memuat standar tersebut, meliputi pelayanan rehabilitasi sosial dasar dan penanganan korban bencana skala kabupaten/kota pada saat dan setelah tanggap darurat.

Untuk Tahun Anggaran 2022, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merancang program kerja yang terdiri dari 1 program internal dan 10 program eksternal berdasarkan urusan. Terdapat 5 program, 8 kegiatan dan 38 sub kegiatan urusan sosial. Sedangkan urusan tenaga kerja terdapat 4 program, 9 kegiatan dan 15 sub kegiatan. Pada urusan transmigrasi terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Program-program yang dilaksanakan pada urusan sosial antara lain Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp 673.105.607, Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran Rp 7.221.224.548 (meliputi anggaran di Dinas sebesar Rp. 4.830.484.008,-, UPT RPSLU Budhi Dharma sebesar Rp. 1.538.974.704,-, UPT RPA Wiloso Projo sebesar Rp. 851.765.836,-), Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan alokasi Rp 18.558.731.492,-, Program Penanganan Bencana dengan alokasi anggaran Rp 111.271.832,- dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan anggaran Rp 26.325.000,-.

Urusan tenaga kerja, terdiri dari Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran Rp 160.938.400, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran Rp 1.621.442.760, Program Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp 917.075.840 dan Program Hubungan Industrial dengan alokasi sebesar Rp 1.017.798.940. Sedangkan urusan transmigrasi hanya terdapat 1 program yakni Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Rp 235.507.800.

Sedangkan operasional perkantoran dan pendukung manajemen dilaksanakan oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.617.893.189. Anggaran tersebut juga memuat alokasi anggaran gaji dan tunjangan pegawai yang sebelumnya merupakan kelompok belanja tidak langsung. Dengan demikian total anggaran di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 45.711.315.408,-.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	-2	-6	-4	-7	-10	-2	-6	-4	-7	-10	-12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%		
			Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	100%				Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	100%		

			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.441.940	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.441.880	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.860.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.860.900	
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen				Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen		
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.460.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.460.900	
			Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen				Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen		

06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.120.140	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			40.120.080	
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen	
			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen				Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	
			Pengelolaan Website OPD	12 bulan				Pengelolaan Website OPD	12 bulan	
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen				Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	10.573.003.322	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	10.573.003.322

01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN	81 ASN	10.569.515.322	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN	81 ASN	10.569.515.322	
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	3.488.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	3.488.000	
			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen				Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	614.552.930	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	614.552.930	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.882.930	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.882.930	
			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 Jenis				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 Jenis		
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				386.754.864	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				386.754.864	

			Alat tulis kantor (60 Jenis)	60 jenis				Alat tulis kantor (60 Jenis)	60 jenis		
			Bahan komputer	13 jenis				Bahan komputer	13 jenis		
			Peralatan Rumah Tangga	25 jenis				Peralatan Rumah Tangga	25 jenis		
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.697.160	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.697.160	
			Barang cetak/penggandaan	8 Jenis				Barang cetak/penggandaan	8 Jenis		
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.900.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.900.000	
			Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Jenis				Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Jenis		
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				602.670.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				602.670.000	
			Penyediaan makan dan minum rapat	84 kali				Penyediaan makan dan minum rapat	84 kali		
			Perjalanan Dinas	24 kali				Perjalanan Dinas	24 kali		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	2.160.884.075	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.160.884.075	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25.750.000	
			Buku cheque	2 buku				Buku cheque	2 buku		

			Jasa Pengiriman dokumen	20 kali			Jasa Pengiriman dokumen	20 kali		
			Materai	2500 lembar			Materai	2500 lembar		
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				10.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10.200.000	
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan			Pembayaran rekening telepon	12 bulan		
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.160.884.075	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.160.884.075	
			Jasa kebersihan kantor	12 bulan			Jasa kebersihan kantor	12 bulan		
			Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor	12 bulan			Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor	12 bulan		
			Jasa pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor dan jasa keamanan kantor	12 bulan			Jasa pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor dan jasa keamanan kantor	12 bulan		
			Jasa dukung administrasi perkantoran/keuangan	14 orang			Jasa dukung administrasi perkantoran/keuangan	14 orang		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				455.574.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			455.574.000	

			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	64 Unit				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	64 Unit		
			STNK Kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnnya	64 unit				STNK Kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnnya	64 unit		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	kota yogyakarta	Pelatihan BSD	2 kali (BSD)		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	kota yogyakarta	Pelatihan BSD	2 kali (BSD)		
					26.124.750					26.124.750	
		kota yogyakarta	Pemberdayaan TKSK	14 orang			kota yogyakarta	Pemberdayaan TKSK	14 orang		
					175.224.000					175.224.000	
		kota yogyakarta	PSM yang mendapat penyuluhan	14 Kecamatan			kota yogyakarta	PSM yang mendapat penyuluhan	14 Kecamatan		
					83.170.000					83.170.000	
04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	kota yogyakarta	Bantuan operasional PSKS kepada K3, Persatuan Purnawirawan dan Wakawuri dan Polisi (PEPABRI), Kr Taruna, PWRI, IPSM, yayaysan Anak Mandiri	6 lembaga		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	kota yogyakarta	Bantuan operasional PSKS kepada K3, Persatuan Purnawirawan dan Wakawuri dan Polisi (PEPABRI), Kr Taruna, PWRI, IPSM, yayaysan Anak Mandiri	6 lembaga		
					64.564.525					64.564.525	
		kota yogyakarta	Musrenbang Tematik Lansia	14 kali			kota yogyakarta	Musrenbang Tematik Lansia	14 kali		
					63.885.000					63.885.000	

		kota yogyakarta	Peringatan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNN)	1 kali			kota yogyakarta	Peringatan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNN)	1 kali		
					99.352.500					99.352.500	
		kota yogyakarta	PSKS (Kr Taruna, LKS, WKSBBM) yang mendapat penyuluhan di 14 kecamatan	945 org			kota yogyakarta	PSKS (Kr Taruna, LKS, WKSBBM) yang mendapat penyuluhan di 14 kecamatan	945 org		
					301.096.832					301.096.832	
		kota yogyakarta	Seleksi PSKS (PSM, Kr Taruna, TKSK, LKS, WKSBBM) berprestasi	5 kejuaraan			kota yogyakarta	Seleksi PSKS (PSM, Kr Taruna, TKSK, LKS, WKSBBM) berprestasi	5 kejuaraan		
					76.350.000					76.350.000	
		kota yogyakarta	Gebyar HALUN				kota yogyakarta	Gebyar HALUN			
					132.630.000					132.630.000	
		kota yogyakarta	Sistem Layanan dan rujukan terpadu (SLRT) di Kota dan Puskesmas	4 lokasi			kota yogyakarta	Sistem Layanan dan rujukan terpadu (SLRT) di Kota dan Puskesmas	4 lokasi		
					40.200.000					40.200.000	
05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	kota yogyakarta	Pelayanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	600 org		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	kota yogyakarta	Pelayanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	600 org		
					71.400.000					71.400.000	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			85%		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			85%		

01	Penyediaan Permakanan	Yogyakarta	Penyediaan Permakanan Anak Terelantar/Anak Jalanan	20 orang	108.000.000	Penyediaan Permakanan	Yogyakarta	Penyediaan Permakanan Anak Terelantar/Anak Jalanan	20 orang	108.000.000
02	Penyediaan Sandang	Yogyakarta	Penyediaan sandang bagi Anak Terelantar/Anak Jalanan	20 orang	4.000.000	Penyediaan Sandang	Yogyakarta	Penyediaan sandang bagi Anak Terelantar/Anak Jalanan	20 orang	4.000.000
03	Penyediaan Alat Bantu	Kota Yogyakarta	Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas	15 unit	55.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Yogyakarta	Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas	15 unit	55.000.000
06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terelantar, Anak Terelantar, Lanjut Usia Terelantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Yogyakarta	Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga, Anak Terelantar	350 orang	204.627.832	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terelantar, Anak Terelantar, Lanjut Usia Terelantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Yogyakarta	Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga, Anak Terelantar	350 orang	204.627.832
			pemberian motivasi, pelatihan singkat bagi keluarga disabilitas	20 orang	124.627.832			pemberian motivasi, pelatihan singkat bagi keluarga disabilitas	20 orang	124.627.832
			Bantuan Stimulan Modal Usaha Peserta Bimbingan Sosial Keluarga Penyandang Disabilitas	40 orang				Bantuan Stimulan Modal Usaha Peserta Bimbingan Sosial Keluarga Penyandang Disabilitas	40 orang	
			Bantuan Stimulan Modal Usaha Peserta Bimbingan Sosial Keluarga Penyandang Sakit Jiwa	20 orang				Bantuan Stimulan Modal Usaha Peserta Bimbingan Sosial Keluarga Penyandang Sakit Jiwa	20 orang	
07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Yogyakarta	Pemberian akses Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak bagi anak terlantar dan anak jalanan.	5 anak	15.350.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Yogyakarta	Pemberian akses Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak bagi anak terlantar dan anak jalanan.	5 anak	15.350.000

08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Yogyakarta	Pemantauan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui Musrenbang Tematik Disabilitas, Bimtek Forum Kecamatan Inklusi (FKI) di 12 kecamatan	12 bulan	514.881.192	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Yogyakarta	Pemantauan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui Musrenbang Tematik Disabilitas, Bimtek Forum Kecamatan Inklusi (FKI) di 12 kecamatan	12 bulan	514.881.192	
			Akses Pelayanan Jamkesus Terpadu bagi Penyandang Disabilitas	200 orang				Akses Pelayanan Jamkesus Terpadu bagi Penyandang Disabilitas	200 orang		
			Peringatan Hari Disabilitas Internasional	500 orang				Peringatan Hari Disabilitas Internasional	500 orang		
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Yogyakarta	operasional pelayanan kedaruratan sosial	12 bulan	5.800.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Yogyakarta	operasional pelayanan kedaruratan sosial	12 bulan	5.800.000	
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Yogyakarta	Penelusuran keluarga untuk anak terlantar	5 anak	8.770.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Yogyakarta	Penelusuran keluarga untuk anak terlantar	5 anak	8.770.000	
12	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Yogyakarta	layanan rujukan untuk anak terlantar ke lembaga sosial	2 anak	4.260.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Yogyakarta	layanan rujukan untuk anak terlantar ke lembaga sosial	2 anak	4.260.000	
05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Yogyakarta	Pemberian Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (300 orang)	300 orang	444.410.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Yogyakarta	Pemberian Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (300 orang)	300 orang	444.410.000	

					100%				100%		
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
	Pemberian Layanan Kedaruratan				3.864.590.242	Pemberian Layanan Kedaruratan				3.864.590.242	
		se kota	Bantuan Sosial Orang Terlantar kehabisan bekal dalam perjalanan	160 orang	40.000.000		se kota	Bantuan Sosial Orang Terlantar kehabisan bekal dalam perjalanan	160 orang	40.000.000	
		se kota	Penanganan Orang Terlantar kehabisan bekal dalam perjalanan	160 orang	5.690.000		se kota	Penanganan Orang Terlantar kehabisan bekal dalam perjalanan	160 orang	5.690.000	
		se kota	Bantuan Sosial Santuan Kematian sebesar @ Rp 3.000.000,-	600 orang	1.800.000.000		se kota	Bantuan Sosial Santuan Kematian sebesar @ Rp 3.000.000,-	600 orang	1.800.000.000	
		se kota	Pelayanan santunan kematian	600 orang	37.460.242		se kota	Pelayanan santunan kematian	600 orang	37.460.242	
		se kota	Layanan TRC PMKS	12 bulan	69.600.000		se kota	Layanan TRC PMKS	12 bulan	69.600.000	
		se kota	Penanganan Covid-19	12 bulan	1.914.340.000		se kota	Penanganan Covid-19	12 bulan	1.914.340.000	
			Pelayanan pemakaman jenazah terlantar	30 orang	37.500.000			Pelayanan pemakaman jenazah terlantar	30 orang	37.500.000	

	Pemberian Bimbingan Fisik, mental spiritual dan Sosial				742.387.480	Pemberian Bimbingan Fisik, mental spiritual dan Sosial			742.387.480	
			Bimbingan Teknis Manajemen Usaha E Warong KUBE Jasa	25 Kelompok	13.330.000			Bimbingan Teknis Manajemen Usaha E Warong KUBE Jasa	25 Kelompok	13.330.000
			Bimbingan Teknis Pengembangan KUBE	15 Kelompok	25.710.000			Bimbingan Teknis Pengembangan KUBE	15 Kelompok	25.710.000
			Pendampingan Masyarakat Miskin dan Rentan yang Terhubung dalam KUBE (320) dan USEP (54 kelompok) di 45 Kelurahan	364 Kelompok	403.347.480			Pendampingan Masyarakat Miskin dan Rentan yang Terhubung dalam KUBE (320) dan USEP (54 kelompok) di 45 Kelurahan	364 Kelompok	403.347.480
			Bantuan Modal Usaha KUBE Pengembangan	15 Kelompok	300.000.000			Bantuan Modal Usaha KUBE Pengembangan	15 Kelompok	300.000.000
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Yogyakarta	Rekomendasi keringanan biaya pendidikan (100 orang) dan penjaminan kesehatan (50 orang) bagi warga miskin	150 orang	68.011.832	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Yogyakarta	Rekomendasi keringanan biaya pendidikan (100 orang) dan penjaminan kesehatan (50 orang) bagi warga miskin	150 orang	68.011.832
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				

	Pemeliharaan anak Terlantar					Pemeliharaan anak Terlantar					
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Yogyakarta	Pendampingan dan Monev penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA.	16 LKSA	16.500.000	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Yogyakarta	Pendampingan dan Monev penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA.	16 LKSA	16.500.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			100 %		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			100 %		
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				2.355.013.789	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				2.355.013.789	
			Database Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS)	1 dokumen	940.089.957			Database Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS)	1 dokumen	940.089.957	

			Database Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	2 dokumen	127.195.000			Database Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	2 dokumen	127.195.000	
			Database PBI Jaminan Kesehatan (PBIJK) Hasil Validasi	1 dokumen	212.856.832			Database PBI Jaminan Kesehatan (PBIJK) Hasil Validasi	1 dokumen	212.856.832	
			Database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1 dokumen	993.727.000			Database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1 dokumen	993.727.000	
			Database Penyandang Disabilitas (PD)	1 Dokumen	81.145.000			Database Penyandang Disabilitas (PD)	1 Dokumen	81.145.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				16.990.195.964	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				16.990.195.964	
			Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan	10765 KPM	268.234.082			Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan	10765 KPM	268.234.082	
			Penyaluran Bantuan Sosial Pangan	19031 KPM	99.572.250			Penyaluran Bantuan Sosial Pangan	19031 KPM	99.572.250	
			Penyaluran bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia	6650 KPM	588.309.632			Penyaluran bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia	6650 KPM	588.309.632	
			Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia	6650 KPM	15.960.000.000			Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia	6650 KPM	15.960.000.000	
			Musrenbang Tematik Kemiskinan	14 Kelompok	74.080.000			Musrenbang Tematik Kemiskinan	14 Kelompok	74.080.000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				321.565.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				321.565.000	
			Bimtek Calon Penerima BKK	50 KPM	21.565.000			Bimtek Calon Penerima BKK	50 KPM	21.565.000	
			Bantuan Modal Usaha UEP PKH Graduasi Mandiri	100 KPM	300.000.000			Bantuan Modal Usaha UEP PKH Graduasi Mandiri	100 KPM	300.000.000	

	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Makanan	Pengadaan dan pengelolaan Bufferstock logistik bencana target	5 jenis		84.854.832	Penyediaan Makanan	Pengadaan dan pengelolaan Bufferstock logistik bencana target	5 jenis		84.854.832	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Pendampingan dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan	14 kecamatan		1.575.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Pendampingan dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan	14 kecamatan		1.575.000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pendampingan dukungan psikososial	14 kecamatan		1.575.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pendampingan dukungan psikososial	14 kecamatan		1.575.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Operasional kampung siaga bencana	3 KSB		13.977.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Operasional kampung siaga bencana	3 KSB		13.977.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Operasional TAGANA	69 Tagana		130.117.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Operasional TAGANA	69 Tagana		130.117.000	
		Operasional Tenaga Pelopor Perdamaian	35 orang				Operasional Tenaga Pelopor Perdamaian	35 orang			
		Penguatan Kapasitas personil Taruna Siaga Bencana	69 tagana				Penguatan Kapasitas personil Taruna Siaga Bencana	69 tagana			
		Penyebarluasan media informasi kebencanaan	14 kecamatan				Penyebarluasan media informasi kebencanaan	14 kecamatan			
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					

	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	kota yogyakarta	Perawatan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/Kota	9 makam	32.805.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	kota yogyakarta	Perawatan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/Kota	9 makam	32.805.000		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				100%	1.588.814.712		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100%	1.588.814.712	
	Penyediaan Permakanan	Umbulharjo, Yogyakarta	Penyediaan Permakanan Bagi Lansia Terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia (RPSLU)	68 orang		845.324.880	Penyediaan Permakanan	Umbulharjo, Yogyakarta	Penyediaan Permakanan Bagi Lansia Terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia (RPSLU)	68 orang		845.324.880
	Penyediaan Sandang	Umbulharjo, Yogyakarta	Penyediaan Sandang Bagi Lansia Terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia (RPSLU)	68 Orang		150.613.000	Penyediaan Sandang	Umbulharjo, Yogyakarta	Penyediaan Sandang Bagi Lansia Terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia (RPSLU)	68 Orang		150.613.000
	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Umbulharjo, Yogyakarta	Reunifikasi Keluarga untuk Lansia di UPT RPSLU Budhi Dharma	5 Orang		2.400.000	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Umbulharjo, Yogyakarta	Reunifikasi Keluarga untuk Lansia di UPT RPSLU Budhi Dharma	5 Orang		2.400.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Umbulharjo, Yogyakarta	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di UPT Budhi Dharma	68 Orang		565.052.832	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Umbulharjo, Yogyakarta	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di UPT Budhi Dharma	68 Orang		565.052.832
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Umbulharjo, Yogyakarta	Pemberian Layanan Kedaruratan Lansia di UPT RPSLU berupa Shelter dan Day Care bagi Lansia	5 orang		25.424.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Umbulharjo, Yogyakarta	Pemberian Layanan Kedaruratan Lansia di UPT RPSLU berupa Shelter dan Day Care bagi Lansia	5 orang		25.424.000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						

	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
	Penyediaan Permakanan		Penyediaan Permakanan Bagi Anak Terlantar (AT) di Rumah Pengasuhan Anak (RPA) Wiloso Projo	30 orang	345.580.000	Penyediaan Permakanan		Penyediaan Permakanan Bagi Anak Terlantar (AT) di Rumah Pengasuhan Anak (RPA) Wiloso Projo	30 orang	345.580.000
	Penyediaan Sandang		Penyediaan Sandang Bagi Anak Terlantar (AT) di Rumah Pengasuhan Anak (RPA) Wiloso Projo	30 orang	72.747.500	Penyediaan Sandang		Penyediaan Sandang Bagi Anak Terlantar (AT) di Rumah Pengasuhan Anak (RPA) Wiloso Projo	30 orang	72.747.500
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak Terlantar di UPT RPA (Rumah Pengasuhan Anak)	30 orang	58.400.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak Terlantar di UPT RPA (Rumah Pengasuhan Anak)	30 orang	58.400.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak Terlantar di UPT RPA (Rumah Pengasuhan Anak)	30 orang	181.732.836	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak Terlantar di UPT RPA (Rumah Pengasuhan Anak)	30 orang	181.732.836
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Pemberian Biaya Pendidikan dan Persediaan Obat-obatan bagi Anak Terlantar di UPT RPA Wiloso Projo	30 orang	199.305.500	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Pemberian Biaya Pendidikan dan Persediaan Obat-obatan bagi Anak Terlantar di UPT RPA Wiloso Projo	30 orang	199.305.500
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				160.938.400	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				160.938.400
				99,24					99,24	

	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Data penganggur	1 dokumen	Rp174.488.400	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Data penganggur	1 dokumen	Rp174.488.400	
			Perencanaan tenaga kerja daerah yang disusun	1 dokumen				Perencanaan tenaga kerja daerah yang disusun	1 dokumen		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				91%	2.024.271.800	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			91%	2.024.271.800
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Yogyakarta	Pencari Kerja yang mendapat pelatihan keterampilan	400 org	1.865.810.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Yogyakarta	Pencari Kerja yang mendapat pelatihan keterampilan	400 org	1.865.810.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Yogyakarta	Lembaga pelatihan kerja yang dibina	30 LPK	121.776.800	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Yogyakarta	Lembaga pelatihan kerja yang dibina	30 LPK	121.776.800	
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil					Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil					
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Yogyakarta	Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan produktivitasnya	50 Perusahaan/UKM/IKM	36.685.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Yogyakarta	Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan produktivitasnya	50 Perusahaan/UKM/IKM	36.685.000	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
					68%	913.576.000			68%	913.576.000	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Pembekalan calon pencari kerja SMK bertanda daftar BKK	300 orang	46.150.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Pembekalan calon pencari kerja SMK bertanda daftar BKK	300 orang	46.150.000	

	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja					
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Yogyakarta	Tenaga Kerja mandiri dan Tenaga kerja lokal yang mengikuti padat karya	148 orang	532.788.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Yogyakarta	Tenaga Kerja mandiri dan Tenaga kerja lokal yang mengikuti padat karya	148 orang	532.788.000	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Terlaksananya Diseminasi dan Sinkronisasi Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	160 perusahaan	Rp 42.600.000,00	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Terlaksananya Diseminasi dan Sinkronisasi Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	160 perusahaan	Rp 42.600.000,00	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Yogyakarta	Diseminasi dan sinkronisasi data forum Bursa Kerja Khusus (BKK)	25 BKK	190.018.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Yogyakarta	Diseminasi dan sinkronisasi data forum Bursa Kerja Khusus (BKK)	25 BKK	190.018.000	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja	700 orang	186.857.040	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja	700 orang		
	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Yogyakarta	Laporan Penempatan Tenaga Kerja Peserta Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	40 Laporan Perusahaan	117.950.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Yogyakarta	Laporan Penempatan Tenaga Kerja Peserta Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	40 Laporan Perusahaan	117.950.000	
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				26.670.000	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				26.670.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Sinkronisasi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja di kota Yogyakarta	50 perusahaan	34.170.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Sinkronisasi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja di kota Yogyakarta	50 perusahaan	34.170.000	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			36,58%		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			36,58%		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				66.112.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				66.112.000	

	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial		1. Deseminasi Peraturan Pemerintah, 2. Konsultasi, Pembinaan Perusahaan	1 dokumen	32.646.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial		1. Deseminasi Peraturan Pemerintah, 2. Konsultasi, Pembinaan Perusahaan	1 dokumen	32.646.000	
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial		1. Deseminasi Peraturan Pemerintah, 2. Konsultasi, Pembinaan Perusahaan	1 Dokumen	33.466.000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial		1. Deseminasi Peraturan Pemerintah, 2. Konsultasi, Pembinaan Perusahaan	1 Dokumen	33.466.000	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Umbulharjo	Pembinaan sarana hubungan industrial	200 Orang	Rp119.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Umbulharjo	Pembinaan sarana hubungan industrial	200 Orang	Rp119.000.000	
		Umbulharjo	pembinaan sarana fasilitas kesejahteraan perusahaan	150 Orang	Rp29.000.000		Umbulharjo	pembinaan sarana fasilitas kesejahteraan perusahaan	150 Orang	Rp29.000.000	
		Umbulharjo	pembinaan jaminan sosial	200 Orang	Rp34.000.000		Umbulharjo	pembinaan jaminan sosial	200 Orang	Rp34.000.000	
		Umbulharjo	Pembinaan norma ketenagakerjaan	200 Orang	Rp50.000.000		Umbulharjo	Pembinaan norma ketenagakerjaan	200 Orang	Rp50.000.000	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	150 Perusahaan	203.946.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	150 Perusahaan 24 Perusahaan	203.946.000	
			Perusahaan yang Mengikuti Deteksi Dini Ketenagakerjaan	24 Perusahaan				Perusahaan yang Mengikuti Deteksi Dini Ketenagakerjaan			

	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY	1 kali	175.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY	1 kali	175.000.000	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi		SP/SB yang Diverifikasi	1 Dokumen	141.272.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi		SP/SB yang Diverifikasi	1 Dokumen	141.272.000	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripatit Daerah Kabupaten/Kota		Sidang Lembaga Kerjasama Tripatit Daerah	3 Kesepakatan	170.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripatit Daerah Kabupaten/Kota		Sidang Lembaga Kerjasama Tripatit Daerah	3 Kesepakatan	170.000.000	
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Umbulharjo	Pembentukan Tim Dewan Pengupahan Kota (DEPEKO)	11 Bulan	654.926.000	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Umbulharjo	Pembentukan Tim Dewan Pengupahan Kota (DEPEKO)	11 Bulan	654.926.000	
		Umbulharjo	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	10 Bulan			Umbulharjo	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	10 Bulan		
		Umbulharjo	Pleno Pencocokan hasil Survey	10 Bulan			Umbulharjo	Pleno Pencocokan hasil Survey	10 Bulan		
		Umbulharjo	Pleno Penetapan UMK	1 Dokumen			Umbulharjo	Pleno Penetapan UMK	1 Dokumen		
		Umbulharjo	Desiminasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021	200 Orang			Umbulharjo	Desiminasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021	200 Orang		
		Umbulharjo	Desiminasi Struktur Skala Upah	200 Orang			Umbulharjo	Desiminasi Struktur Skala Upah	200 Orang		
		Umbulharjo	Desiminasi UMK	250 Orang			Umbulharjo	Desiminasi UMK	250 Orang		
	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Umbulharjo	Desiminasi THR Keagamaan dan uang Service	200 Orang		Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Umbulharjo	Desiminasi THR Keagamaan dan uang Service	200 Orang		
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			100%	259.789.500	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			100%	259.789.500	

	Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi	Kota Yogyakarta	Pemberian perbekalan kepada calon transmigran	10 KK	114.000.000	Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi	Kota Yogyakarta	Pemberian perbekalan kepada calon transmigran	10 KK	114.000.000	
	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	2 daerah	kerjasama dengan daerah tujuan	2 daerah	52.990.000	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	2 daerah	kerjasama dengan daerah tujuan	2 daerah	52.990.000	
	Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1(satu) daerah kabupaten/kota)	2 daerah	Penempatan calon transmigran	10 KK	43.995.000	Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1(satu) daerah kabupaten/kota)	2 daerah	Penempatan calon transmigran	10 KK	43.995.000	
	Pelatihan Transmigrasi	Kota Yogyakarta	Calon Transmigrasi mengikuti pelatihan pra penempatan	10 KK	48.804.500	Pelatihan Transmigrasi	Kota Yogyakarta	Calon Transmigrasi mengikuti pelatihan pra penempatan	10 KK	48.804.500	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2022 telah dimasukkan juga beberapa usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan. Usulan yang berasal dari masyarakat yang diterima Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta semuanya memiliki dasar prioritas tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Usulan kegiatan bidang sosial yang diakomodir diantaranya Peningkatan Kapasitas anggota karang taruna, Pengadaan fasilitas Kursi roda dan Kreg untuk Lansia tidak mampu guna mendukung mobilitas sehari-hari, Pertemuan PSM, Pertemuan Karang Taruna, Gelar lansia, Pembinaan Lansia Untuk pengetahuan, Fasilitasi lembaga IPSM, Membantu PMKS di Kelurahan Terban, Penguatan lembaga lansia, Rapat pengurus lansia guna Memperlancar kegiatan lansia dg program yang tersedia, Pertemuan Rutin Lansia, Meningkatkan Kualitas Hidup & kesehatan Lansia, Fasilitasi Yandu Lansia untuk Peningkatan kegiatan di wilayah, Gebyar Lansia (Sosialisasi antar sesama lansia lewat senam bersama), KMS/PKH lebih objektif, Intervensi Kemiskinan (Konsumsi), Gebyar Karang Taruna (Gelar Potensi Kesenian Pemuda se-Kelurahan), Latihan Dasar Kepemimpinan Karang Taruna, Sambang Senyum Lansia dan Penyuluhan Kelompok Lansia RW, FGD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Apresiasi Karang Taruna Kel. Suryodiningratan, Sosialisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Sosialisasi Karang Taruna Kel. Suryodiningratan, Penyuluhan pekerja sosial kelurahan, Peningkatan Kapasitas PSM Kelurahan menuju PSM Sejahtera, Sosialisasi Kelembagaan Karang Taruna, Sosialisasi dan penguatan pengurus WKSBM Sorosutan dengan mengundang Narasumber dari Dinsos Kota maupun Provinsi, Pemberdayaan lansia, Kelompok Lansia produktif, Penyuluhan Kesehatan, IPSM (Ikatan pekerja sosial Masyarakat), Bakti Sosial Bagi Lansia dan disabilitas.

Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, usulan yang diakomodir adalah pelatihan keterampilan diantaranya Stir Mobil, Pelatihan Pembuatan Batik tulis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, Pelatihan Menjahit, Kursus Mengemudi dan Layanan SIM A, Mengembangkan produk unggulan warga (batik: tulis, shibori, ecoprint, jumputan), Pelatihan Bisnis Online, Pelatihan IT dan content marketing, Pelatihan tata busana dan rias karakter,

pelatihan Event Organiser, Pelatihan komputer, Pelatihan Dasar Web Programmer.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	Menyesuaikan, Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Stir Mobil	V: 20 orang A: Rp20.000.000	Disetujui dianggarkan thn 2022 sebanyak 2 angkatan (40 orang) @ Rp. 3.900.000,- 4 kali pertemuan = Rp 15.600.000
2.	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	Kel. Suryatmajan, Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Pelatihan Pembuatan Batik tulis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.	V : - A : 15.740.000,-	Disetujui dianggarkan thn 2022 sebanyak 1 angkatan (20 orang) @ Rp. 4.000.000,- selama 25 hari = Rp 100.000.000
3.	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan pemuda	Karang Taruna Kelurahan Wirogunan, Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan	Peningkatan kapasitas karang taruna.	V: 50 Orang A: Rp 6.000.000	Disetujui
4.	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan lansia	Paguyuban Lansia Kelurahan, Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan	Pembinaan Lansia.	V: 60 Orang A; Rp 5.000.000	Disetujui
5.	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan pemuda	kelurahan klitren,, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	Peningkatan Kapasitas anggota karang taruna	. V: 20 orang x 4 kali A: Rp 4.000.000	Disetujui
6	[TINGKAT KOTA] Pengadaan sarana sosial	Kelurahan Klitren,, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	Pengadaan fasilitas Kursi roda dan Kreg untuk Lansia tidak mampu guna mendukung mobilitas sehari-hari.	V: 11 unit A: Rp 9.830.800	Disetujui dengan prioritas
7	[TINGKAT KOTA] Pengadaan sarana sosial	Kp. Gemblakan Atas, Kp. Ledok Macanan, Kp. Suryatmajan, Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Pengadaan keranda stenlees.	V : 3 unit A ; 6.000.000,-	Kewenangan Kec/Kel
8	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	KEL. SURYATMAJAN, Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Pertemuan PSM.	V : 30 Orang A : 7.200.000,-	Disetujui
9	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan pemuda	kelurahan suryatmajan,, Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Pertemuan Karang Taruna.	V : 30 Orang A : 7.200.000,-	Disetujui
10	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Pelatihan Las	V : 30 Orang 2 Hari A : 10.586.000	Kewenangan Kec/kel
11	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	Kelurahan Semaki, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Pelatihan Menjahit	V : 30 Orang 2 Hari A : 10.286.000	Disetujui dianggarkan thn 2022 menjahit dasar 1 angkatan (20 org) & menjahit terampil 1 angkatan (20 org) - menjahit dasar @ Rp. 4.500.000,-, selama 30 hari = 135.000.000 - menjahit terampil @ Rp. 5.500.000,-, selama 30 hari = Rp 165.000.000
12	Kesejahteraan masyarakat	kel. kotabaru, gondokusuman, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Pendampingan pengisian raport keluarga miskin, Evaluasi warga miskin		Ditolak (Kewenangan Bappeda)

13	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo..., Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	Pelatihan Manajemen Organisation (MO)	V : 1 Paket, A : 6.000.000	Kewenangan Kec/Kel
14	[TINGKAT KOTA] Pengadaan sarana sosial	RT 11 RW 03, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	pengadaan Kursi Roda	V: 1 buah A: Rp. 2500000	Disetujui dengan prioritas
15	[TINGKAT KOTA] Pengadaan sarana sosial	RT 11, RW 03, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	pengadaan Tandu	V: 1 bh A: Rp. 2500000	Kewenangan Kec/Kel
16	[TINGKAT KOTA] Pengadaan sarana sosial	RT11, RW03, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	pengadaan Keranda	V: 1 bh A: Rp. 3000000	Kewenangan Kec/Kel
17	[TINGKAT KOTA] Pengadaan sarana sosial	RW 11, Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Peningkatan Sarpras untuk lansia berupa lahan untuk beraktivitas	V: 100 m2 A: 600.000.000	Kewenangan Dispetaru
18	[TINGKAT KOTA] Pengadaan sarana sosial	RW 12, Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Peningkatan Sarpras untuk lansia berupa lahan untuk beraktivitas	V: 100 m2 A: 600.000.000	Kewenangan Dispetaru
19	[TINGKAT KOTA] Pengadaan sarana sosial	RW 13, Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Peningkatan Sarpras untuk lansia berupa lahan untuk beraktivitas	V: 100 m2 A: 600.000.000	Kewenangan Dispetaru
20	[TINGKAT KOTA] Pengadaan sarana sosial	RW 13 dan RW 15, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	pengadaan Keranda	V: 1 buah A: Rp. 8000000	Kewenangan Kec/Kel
21	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	aula kel baciro..., Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	Pelatihan Bengkel.	V: 20 orang A: Rp 3.345.000	Kewenangan Kec/Kel
22	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	aula kel, baciro, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	Pelatihan Sablon.	V: 30 Orang A: Rp 3.345.000	Kewenangan Kec/Kel
23	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	Gendeng RW 15, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	Kursus Mengemudi dan Layanan SIM A	V: 10 org A: Rp 20.000.000	Disetujui dianggarkan thn 2022 sebanyak 2 angkatan (40 org)
					@ Rp. 3.900.000,-
					4 kali pertemuan = Rp 15.600.000
24	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan lansia	RW 07, 08,09, terban, gondokusuman, Kota Yogyakarta, Terban	Penyuluhan kesehatan lansia, Meningkatkan kesehatan lansia		Kewenangan dinas Kesehatan
25	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	LPMK Kelurahan, terban, gondokusuman, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	Pelatihan Membuat, Mengembangkan produk unggulan warga (batik: tulis, shibori, ecoprint, jumputan)		Disetujui dianggarkan thn 2022 sebanyak 1 angkatan (20 org)
					@ Rp. 4.000.000,-
					selama 25 hari = Rp 100.000.000
26	Kesejahteraan masyarakat	LPMK kelurahan terban, gondokusuman, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	Evaluasi rapor keluarga KMS 3, Peningkatan kualitas hidup		Kewenangan Bappeda
27	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan lansia	kelurahan terban, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	Gelar lansia, Kesehatan lansia		Disetujui
28	Kesejahteraan masyarakat	Kampung Purbosati, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	UPPKS, Meningkatkan pendapatan anggota UPPKS		Kewenangan DP3AP2KB/PKK
29	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan lansia	kel terban, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	Pembinaan Lansia, Untuk pengetahuan		Disetujui
30	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	RW.01.02.03,04 Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	Menambah pengetahuan dan income keluarga	V: 40 orang A: Rp 12.500.000	Kewenangan Kec/Kel
31	[TINGKAT KOTA] Pengadaan sarana sosial	Kampung Purbosati, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	ATK Dapur gizi dan balita, Kelancaran dalam penyelenggaraan dapur gizi balita		Kewenangan DP3AP2KB/PKK

32	[TINGKAT KOTA] PEMBERDAYAAN lansia	Kampung Basen, Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	"Peduli Lansia (Gebyar Lansia)"	V : 1 kali A : 7,500,000	Disetujui
33	[TINGKAT KOTA] Pelatihan keterampilan dan produksi produk	RW,12,13,14, Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	Kursus Menjahit Kampung Purbayan	V : 30 org x 14 hari x 1 kali A : 48,330,000	Disetujui dianggarkan thn 2022 menjahit dasar 1 angkatan (20 org) & menjahit terampil 1 angkatan (20 org)
					- menjahit dasar @ Rp. 4.500.000,-, selama 30 hari = 135.000.000
					- menjahit terampil @ Rp. 5.500.000,-, selama 30 hari = Rp 165.000.000
34	Kesejahteraan masyarakat	RW 01-12, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	Fasilitasi lembaga IPSM, Membantu PMKS di Kelurahan Terban		Disetujui
35	[TINGKAT KOTA] Pengadaan sarana sosial	Dawis PKK, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	ATK, Kelengkapan administrasi PKK		Kewenangan DP3AP2KB / Kec / Kel
36	[TINGKAT KOTA] Pengadaan sarana sosial	kelurahan, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	ATK Pengadaan alat pembelajaran di rumah Untuk pelaksanaan anak belajar di rumah		Kewenangan DP3AP2KB / Kec / Kel
37	[TINGKAT KOTA] PEMBERDAYAAN lansia	terban, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	Penguatan lembaga lansia, Tambah ilmu dan pengetahuan		Disetujui
38	[TINGKAT KOTA] PEMBERDAYAAN lansia	kelurahan terban,, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	Rapat pengurus lansia, Memperlancar keg lansia dg program yang tersedia		Disetujui
39	[TINGKAT KOTA] PEMBERDAYAAN lansia	RW 1 - 12, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	Pertemuan Rutin Lansia, Meningkatkan Kualitas Hidup & kesehatan Lansia		Disetujui
40	[TINGKAT KOTA] PEMBERDAYAAN lansia	Kel. Terban, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	Fasilitasi Yandu Lansia, Peningkatan kegiatan di wilayah		Disetujui
41	[TINGKAT KOTA] PEMBERDAYAAN lansia	Kalurahan Prawirodirjan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	Gebyar Lansia (Sosialisasi antarsesama lansia lewat senam bersama),	Volume : 200 Orang , Anggaran : 13.850.000	Disetujui
42	[TINGKAT KOTA] Pelatihan keterampilan dan produksi produk	Kelurahan Bener, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	Pelatihan Menjahit Sorjan dan Kebayak	V: 20 Orang A: Rp 10.000.000	Kewenangan Kec/Kel
43	Kesejahteraan masyarakat	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	KMS/PKH lebih objektif	V= 40 orang A= 4500000	Disetujui dengan prioritas
44	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	Kelurahan Bener, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	Pelatihan Publick Speaking	V: 20 Orang A: Rp 4.695.500	Kewenangan Kec/Kel
45	[TINGKAT KOTA] PEMBERDAYAAN lansia	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pembinaan lansia	V=30 orang A=3810000	Disetujui
46	[TINGKAT KOTA] Pengadaan sarana sosial	Kelurahan Sorosutan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pengadaan fasilitas lansia/disabilitas: kursi roda, krek, alkes pemeriksaan	V=5 unit A=5000000	Disetujui dengan prioritas
47	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	KAMPUNG PATANGPULUHAN, Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	Pelatihan Dasar Web Programmer	V 30 org A 5,000,000	Disetujui dianggarkan thn 2022 sebanyak 1 angkatan (20 org)
					@ Rp. 2.000.000,-
					selama 10 hari (hybrid) = Rp 20.000.000
48	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	KAMP. PATANGPULUHAN., Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	Pelatihan Bisnis Online	V : 30 org A : 5,000,000	Disetujui dianggarkan thn 2022 sebanyak 1 angkatan (20 org)
					@ Rp. 2.000.000,-
					selama 10 hari (hybrid) = Rp 20.000.000
49	[TINGKAT KOTA] Peningkatan	KAMP PATANGPULUHAN KEL PATANGPULUHAN,,,,	Workshop Berjenjang "Optimalisasi Fungsi	V A 5,150,000	Kewengan kec/Kel

	keterampilan masyarakat	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	Gadget untuk Sistem Edukasi & Informasi Publik di Masyarakat dalam Era Digital".		
50	Kesejahteraan masyarakat	Kelurahan Bener Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	Intervensi Kemiskinan (Konsumsi)	V: 470 KK A: Rp 15.000.000	Disetujui dengan prioritas
51	Kesejahteraan masyarakat	KEL PATANGPULUHAN,, WIROBRAJAN, Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	Anjang kasih dan perhatian ke Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	V 100 org A 10,000,000	Kewengan kec/Kel
52	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan pemuda	Kelurahan Suryodiningratan,,,,,,,,, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Gebyar Karang Taruna (Gelar Potensi Kesenian Pemuda se-Kelurahan)	V; 1 Paket, A; Rp. 40.000.000	Disetujui
53	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan pemuda	Kelurahan Suryodiningratan,,,,, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Latihan Dasar Kepemimpinan Karang Taruna, KEL, syd	V; 35 org, A; Rp. 20.000.000	Disetujui
54	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan lansia	RW.07,,,,,,,,, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Ajaksana ke panti wreda/jompo	V; 60 orang, A; Rp. 3.000.000	Kewenangan Kec/Kel
55	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan lansia	4 RW Kelurahan Suryodiningratan,,,,,,,,, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Sambang Senyum Lansia dan Penyuluhan Kelompok Lansia RW	V; 25 org 4x (4 RW) (100 org) A; Rp. 5.000.000	Disetujui dengan prioritas
56	Kesejahteraan masyarakat	Kelurahan Suryodiningratan,,,,,,,,, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	FGD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Kel. SYD	V; 40 org 1 kali, A; Rp. 3.850.000	Disetujui dengan prioritas
57	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan pemuda	Kelurahan Suryodiningratan,,,,,,,,, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Apresiasi Lomba Pendekatan Budaya	V; 50 org, A; Rp. 60.000.000	kewenangan Dinas Kebudayaan
58	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan pemuda	Kelurahan Suryodiningratan,,,,,,,,, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Pelatihan Public Speaking Karang Taruna	V; 55 org, A; Rp 20.000.000	kec/kel
59	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	Kelurahan Suryodiningratan,,,,,,,,, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Pelatihan IT dan content marketing. Kel. SYD	V; 35 org, A; Rp. 28.000.000	Disetujui dianggarkan thn 2022 sebanyak 1 angkatan (20 org)
					@ Rp. 2.000.000,-
					selama 10 hari (online) = Rp 20.000.000
60	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan pemuda	Kelurahan Suryodiningratan,,,,,,,,, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Apresiasi Karang Taruna Kel. Suryodiningratan	V; 35 org, A; Rp. 35.000.000	Disetujui dengan prioritas
61	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan lansia	Pendopo Kel. KRICAK, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	PEMBINAAN LANSIA	V: 40 orang A: Rp 3.604.000	Disetujui
62	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan pemuda	Kelurahan Suryodiningrata,,,,,,,,, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Sosialisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	V; 25 org 4 kali (4 kpg) A; Rp. 8.200.000	Disetujui
63	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan pemuda	Kelurahan Suryodiningratan,,,,,,,,, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Sosialisasi Karang Taruna Kel. Suryodiningratan	V; 35 org + remaja di 17 RW, A; Rp. 25.000.000	Disetujui
64	Kesejahteraan masyarakat	Pendopo Kelurahan Kricak, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	PENGUATAN KELEMBAGAAN TKPK	V: 40 orang A: Rp 3.604.000	Kewenangan Bappeda
65	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	Tingkat kelurahan Masyarakat Kricak, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	Pelatihan tata busana dan rias karakter	V: 90 orang A: Rp 9.710.500	Disetujui(masih memungkinkan untuk tata busana,masih serumpun dengan menjahit dasar)

					sdgkan untuk rias karakter merupakan program pelatihan yg berbeda
66	Kesejahteraan masyarakat	Pendopo KELURAHAN KRICAK, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	Penyuluhan pekerja sosial kelurahan	V: 30 orang A: Rp 2.970.500	Disetujui
67	Kesejahteraan masyarakat	Kel Syd,,,,,, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Pelatihan Motivasi Warga Masyarakat (AMT)	V; 40 org, A; Rp. 10.000.000	Kec/kel
68	Kesejahteraan masyarakat	Pendopo Kelurahan KRICAK, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	Peningkatan Kapasitas PSM Kelurahan menuju PSM Sejahtera	V: 20 orang A: Rp 2.297.000	Disetujui
69	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan pemuda	Pendopo kelurahan Kricak, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	Sosialisasi Kelembagaan Karang Taruna	V: 30 orang A: Rp 2.970.500	Disetujui
70	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan pemuda	Kelurahan Demangan, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Peningkatan kapasitas Karang Taruna	V : "50 orang 1 kelompok Karang Taruna" A : 4,550,000	Disetujui
71	[TINGKAT KOTA] Pelatihan keterampilan dan produksi produk	Kampung Gambiran RW 10, Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	Pelatihan bengkel di RW 10	V: 20 orang, A: 15,000,000	kec/kel
72	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan lansia	Sorosutan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pembinaan Lansia	V=2 x 40 orang A=9000000	Disetujui
73	Kesejahteraan masyarakat	Sorosutan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Sosialisasi dan penguatan pengurus WKSBM Sorosutan dengan mengundang Narasumber dari Dinsos Kota maupun Provinsi	V=1 Paket A=3120000	Disetujui
74	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan pemuda	RW 08, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pemberdayaan Pemuda	V=40 orang A=4500000	Kec/kel
75	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan lansia	RW 08, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pemberdayaan lansia	V=40 orang A=4500000	Disetujui
76	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan pemuda	Wilayah RW 15 Juminahan., Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Peningkatan kapasitas karang taruna	V: 50 ORANG A: 20.000.000	Disetujui
77	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	Kampung Gambiran Kelurahan Pandeyan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	Pelatihan membuat,	V: 15 orang, A: Rp 15.000.000	Disetujui dianggarkan thn 2022 sebanyak 1 angkatan (20 org)
					@ Rp. 4.000.000,-
					selama 25 hari = Rp 100.000.000
78	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	Kampung Ngelak Mulyo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	pelatihan Event Organiser	V=30 orang A=5000000	Disetujui dianggarkan di thn 2022 sebanyak 1 angkatan (20 org)
					@ Rp. 4.000.000,-
					selama 25 hari = Rp 100.000.000
79	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	Kampung Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	Pelatihan jahit mahir,	V: 3 orang, A: Rp 15.000.000	Disetujui dianggarkan thn 2022 menjahit terampil 1 angkatan (20 org)
					@ Rp. 5.500.000,-,
					selma 30 hari = Rp 165.000.000
80	Kesejahteraan masyarakat	Kampung Pandeyan dan Kampung Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	Pembuatan Raport Keluarga,	V: 80KK, A: Rp 10,000,000	Kewenangan Bappeda
81	[TINGKAT KOTA] Pengadaan sarana sosial	RT 25 RW 06, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	Pembaharuan Alat Kesehatan Lansia	V: 1 paket A: Rp 3.000.000	Dinas Kesehatan

82	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	RT 12, Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Pelatihan komputer	V: 30 ORANG A: 3.000.000	Disetujui dianggarkan thn 2022 sebanyak 1 angkatan (20 org) @ Rp. 2.000.000,- selama 10 hari (online) = Rp 20.000.000
83	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	RT 12., Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Pelatihan tata rias/salon/sanggul	V: 20 ORANG A: 2.000.000	kec/kel
84	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	RT 12., Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Pelatihan EO	V: 30 ORANG A: 3.000.000	Disetujui dianggarkan di thn 2022 sebanyak 1 angkatan (20 org) @ Rp. 4.000.000,- selama 25 hari = Rp 100.000.000
85	[TINGKAT KOTA] Peningkatan keterampilan masyarakat	RT 14., Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Pelatihan membuat/pengolahan limbah batik	V: 2 x 10 orang A: 3.000.000	Disetujui dianggarkan thn 2022 sebanyak 1 angkatan (20 org) @ Rp. 4.000.000,- selama 25 hari = Rp 100.000.000
86	[TINGKAT KOTA] Pengadaan sarana sosial	kelurahan Tegal panggung, Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	1. Pengadaan keranda stainless beroda V: 1 UNIT A: 5.000.000 2. Pengadaan kelambu penutup untuk memandikan jenazah V: 1 UNIT A: 3.000.000 3. Pengadaan lonceng penanda kematian V: 1 unit A: 1.500.000		Kec/Kel
87	[TINGKAT KOTA] Pengadaan sarana sosial	RW 05 Sidomulyo, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	Keranda Stenlis	V: 1 buah A: Rp 10.000.000	Kec/Kel
88	[TINGKAT KOTA] Pemberdayaan lansia	Kelurahan Bener, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	Kelompok Lansia produktif, Penyuluhan Kesehatan	V: 50 Orang A: Rp 5.000.000	Disetujui
89	Kesejahteraan masyarakat	RW.1 s/d 7, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	IPSM (Ikatan pekerja sosial Masyarakat), Bakti Sosial Bagi Lansia dan disabilitas	V: 100 Orang A: Rp 15.000.000	Disetujui

Selain mengakomodir beberapa usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), dalam Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2022 juga memasukkan beberapa kegiatan dari masyarakat melalui Pokir. Usulan yang berasal dari masyarakat yang diterima Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta semuanya memiliki dasar prioritas tertentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Usulan kegiatan bidang sosial yang diakomodir diantaranya pengadaan dana hibah untuk lansia KMS dan non KMS di wilayah Kecamatan Danurejan, pembinaan lansia untuk ibu-ibu usia (Lansia) yang tidak muda namun masih produktif agar di beri pelatihan menjahit, peningkatan kapasitas karang taruna, pelatihan kepemimpinan karang

taruna, pembinaan generasi muda, bantuan kursi roda untuk lansia dan untuk disabilitas, dana hibah bantuan KUBE, pemberdayaan dan pendampingan ekonomi disabilitas, pengajuan PKH, sosialisai dan penyuluhan tentang Jaminan Sosial kepada masyarakat, pemberian layanan rujukan untuk anak terlantar.

Sedangkan dibidang ketenagakerjaan, usulan yang diakomodir adalah pelatihan digital marketing Karang Taruna, pelatihan SDM berbagai ketrampilan, pelatihan Manajemen Organisation, pelatihan keterampilan kerajinan untuk warga disabilitas se-Kota Jogja, pelatihan marketing online, pelatihan salon dan menjahit, pendampingan diklat kerja untuk warga usia produktif seperti barista, produksi produk kuliner, kompetensi tour guide, bantuan ekonomi dan pelatihan khusus untuk berkegiatan ekonomi di dalam new normal setelah pandemi covid-19, pelatihan dan pendampingan berserikat bagi pekerja.

Tabel 2.5
Usulan Pokir dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Danurejan, Danurejan, Seluruh Kelurahan/Desa	Pengadaan dana hibah untuk lansia KMS dan non KMS di wilayah Kecamatan Danurejan	Koefisien : 6650 KPM (Sekota Yk) Anggaran : 15.960.000.000,-	disetujui
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Gondokusuman, Seluruh Kelurahan/Desa	Pengadaan dana hibah untuk lansia KMS dan non KMS di wilayah Kecamatan Gondokusuman	Koefisien : 6650 KPM (seKota Yk) Anggaran : 15.960.000.000,-	
		Gunungketur RW 9 Pakualaman, Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	Pembinaan lansia untuk ibu-ibu usia (Lansia) yang tidak muda namun masih produktif, di beri pelatihan menjahit		Kewenangan Kecamatan/Kelurahan
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan Kab/Kota	RW 10 Sagan, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	Peningkatan kapasitas karang taruna	945 orang, Anggaran : 282796832	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan Kab/Kota	RT 26 RW 08 Demangan, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Peningkatan kapasitas karang taruna	945 orang, Anggaran : 282796832	
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Prenggan Kg, Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	Pelatihan remaja untuk kewirausahaan	Koefisien : 400 orang (pencari kerja) Anggaran : 1.865.810.000	disetujui dengan prioritas
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan	kantor dindikpora, Kota Yogyakarta, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	perlunya kajian peta jalan kreatifitas pemuda kota yogyakarta		kewenangan Dinas Pendidikan pemudan dan Olah raga

	Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan Kab/Kota				
		semaki gede, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Mohon diberikan pelatihan dan bantuan modal membuat face shield		kewenangan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan Kab/Kota	keparakan kidul, Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Pelatihan kepemimpinan karang taruna	945 orang, Anggaran : 282796832	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan Kab/Kota	pujokusuman, Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Pembinaan generasi muda	Koefisien : 945 orang Anggaran : 282796832	
		kantor dinas sosial kota yogyakarta, Kota Yogyakarta, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	kebutuhan ambulan transportasi medis non gawat darurat untuk memfasilitasi warga lansia, difabel dan tidak mampu untuk transportasi antar jemput ke fasilitas kesehatan	Rekomendasi :	Kewenangan DBPKAD
	Penyediaan alat bantu (bagi Penyandang disabilitas)	Notoyudan RW.25/RT.90, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Mohon bantuan kursi roda	Koefisien : 15 unit Anggaran : 55000000	disetujui dengan melihat kesesuaian dan prioritas
		Sidomulyo RW.5/RT.18, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	Mohon bantuan keranda mayat di Sidomulyo RW.5/RT.18		Kewenangan Kecamatan/Kelurahan
	Penyediaan alat bantu (bagi Penyandang disabilitas)	Jlagran RW.1/RT.1, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Mohon bantuan kursi roda untuk lansia di Jlagran RW.1/RT.1	Koefisien : 15 unit Anggaran : 55000000	disetujui dengan melihat kesesuaian dan prioritas
	Penanganan Covid-19 (meliputi Pelayanan shelter, isolasi mandiri di wilayah)	Prawirodirjan RW12 Gondomanan Yk, Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	BANTUAN COVID 19 BAGI WARGA ISOLASI MANDIRI MINTA BAHAN POKOK SAJA JANGAN BAHAN MATENG ATAU JADI	Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1914340000	disetujui dengan melihat prioritas
	Penyediaan alat bantu (bagi Penyandang disabilitas)	Prawirodirjan RW 11 Gondomanan Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Prawirodirjan	PERMOHONAN TANDU ATAU KURSI RODA UNTUK MEMBANTU MENGEVAKUASI WARGA YANG SAKIT	Koefisien : 15 unit Anggaran : 55000000	disetujui dengan melihat kesesuaian dan prioritas
		giwangan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	memohon bantuan sepeda motor viar basis RW		Kewenangan BPKAD
		gedongan, Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	permohonan motor viar untuk memperlancar keperluan masyarakat dalam bergotong royong.		Kewenangan BPKAD
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (bantuan Asstensi Sosial Lanjut Usia)	Bausasran, Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	Bantuan untuk lansia, seperti PMT dan fasilitas lain	Koefisien : 6650 KPM Anggaran : 15960000000	
	Penyediaan alat bantu (bagi Penyandang disabilitas)	bener RT 10, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	pengadaan fasilitas disabilitas : kursi roda	Koefisien : 15 unit Anggaran : 55000000	disetujui dengan melihat kesesuaian dan prioritas
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (bantuan Asstensi Sosial Lanjut Usia)	Kuncen RW 04 Pakuncen, Wirobrajan,yk, Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	Pengadaan fasilitas lansia tidak ber KMS Juga di perhatikan, terkait dana stimulan tiap bulan	Koefisien : 6650 KPM Anggaran : 15960000000	disetujui dengan prioritas

	Pendataan Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten Kota (Database Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial)	Kuncen RW 04 Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	Pengadaan fasilitas lansia/disabilitas: Pengadaan KMS Untuk Disabilitas juga di perhatikan	Koefisien : 1 dokumen Anggaran : 940089957	
	Penyediaan alat bantu (bagi Penyandang disabilitas)	tegalrejo rw 8 rt 32, Kota Yogyakarta, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Alat Difabel Kursi Roda & Krek	Koefisien : 15 unit Anggaran : 55000000	disetujui dengan melihat kesesuaian dan prioritas
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	kalurahan Suryodingratan, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	pelatihan digital marketing Karang Taruna Suryodiningratan	Koefisien : 400 orang (pencari kerja) Anggaran : 1.865.810.000	disetujui dengan prioritas
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	RT 42 RW 10, Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	pelatihan SDM berbagai ketrampilan	Koefisien : 400 orang (pencari kerja) Anggaran : 1.865.810.000	disetujui dengan prioritas
		RW 09 Taman, Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	pelatihan membuat kue		Kewenangan Kecamatan/Kelurahan
		RW 06, Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	pelatihan tata boga dan membuat kue		Kewenangan Kecamatan/Kelurahan
		RT 23 RW 06, Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	pelatihan kuliner dan pembuatan roti		Kewenangan Kecamatan/Kelurahan
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan Kab/Kota (untuk Karang Taruna)	Kampung Wisata Warungboto, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	Pelatihan Manajemen Organisation (MO)	Koefisien : 945 orang Anggaran : 282796832	
		se-Kelurahan Tahunan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	Pelatihan Tata Rias kelas pemula		Kewengan Kecamatan/Kelurahan
		RW 06, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	pelatihan kue dan menjahit		Kewengan Kecamatan/Kelurahan
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Warga Tahunan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	Pelatihan keterampilan kerajinan untuk warga disabilitas se-Kota Jogja	Koefisien : 20 orang Anggaran : 95000000	
		RW 05 Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	Pelatihan membuat kue		Kewengan Kecamatan/Kelurahan
		RW 03 Kadipaten, Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	Pelatihan dari barang bekas		Kewengan Kecamatan/Kelurahan
		RW 04 Kadipaten, Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	pelatihan Sablon kaos dan plastik		Kewengan Kecamatan/Kelurahan
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	KEPARAKAN LOR RW 07-09 RT 27-47, Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PELATIHAN MARKETING ONLINE	Koefisien : 400 orang (pencari kerja) Anggaran : 1.865.810.000	disetujui dengan prioritas
		RW 03 Kadipaten, Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	pelatihan membuat kue dan makanan tradisional		Kewengan Kecamatan/Kelurahan
		RW 03 Kadipaten, Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	pelatihan hias		Kewengan Kecamatan/Kelurahan
		RW 03 Kadipaten, Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	Pelatihan budidaya Ikan lele		Kewengan Kecamatan/Kelurahan

		Gambiran RW.009, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	Penumbuh kembangan UMKM berbasis pakekan adat jawa		Kewengan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Warungboto RW.009/RT.038, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	Menindak lanjuti kegiatan yang dulu sudah mendaftar untuk yang sekarang apakah harus mendaftar lagi atau bagaimana	Koefisien : 400 orang (pencari kerja) Anggaran : 1.865.810.000	disetujui dengan prioritas
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	sosromenduran RW 07, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	pelatihan salon dan menjahit	Koefisien : 400 orang (pencari kerja) Anggaran : 1.865.810.000	disetujui dengan prioritas
		njaglrn, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	pelatihan pembuatan kue kering dan kue basah		Kewenangan Kecamatan/Kelurahan
		RW 01 RT 05, Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	permohonan diadakan pelatihan kuliner dan pengadaan alat-alat		Kewenangan Kecamatan/Kelurahan
		sosrodipuran, RW 04&6, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	pelatihan pembuatan kue tradisional		Kewenangan Kecamatan/Kelurahan
		Brontokusuman RW 17, Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	pelatihan membuat untuk ibu ibu PKK		Kewenangan Kecamatan/Kelurahan
		Mergangsan lor RW 14, Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan	Pelatihan pembuatan batik ecoprint		Kewenangan Kecamatan/Kelurahan
		RW 8, 9, 10 Kampung Taman, Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	Pelatihan batik jumpit dan modern		Kewenangan Kecamatan/Kelurahan
		Mangkuyudan, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	Pelatihan Ketrampilan bagi peningkatan ekonomi Ibu - ibu		Kewenangan Kecamatan/Kelurahan
		Kalurahan Patehan, Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	Pelatihan ketrampilan Ekonomi bagi Ibu - ibu		Kewenangan Kecamatan/Kelurahan
		karangwaru, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	Pelatihan Batik Tulis		Kewenangan Kecamatan/Kelurahan
		wirobrajan, Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan	pelatihan olahan pangan dan pelatihan menjahit		Kewenangan Kecamatan/Kelurahan
		mergangs, Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	pelatihan pembuatan makanan tradisional		Kewenangan Kecamatan/Kelurahan
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Dukuh RW 10, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	Pendampingan diklat kerja untuk warga usia produktif di kampung Gedongkiwo. Seperti barista, produksi produk kuliner, kompetensi tour guide	Koefisien : 400 orang (pencari kerja) Anggaran : 1.865.810.000	disetujui dengan prioritas
		mrican rw9, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	Pelatihan Kuliner		Kewenangan Kecamatan/Kelurahan
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Dukuh RW 10 & 11, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	Bantuan ekonomi dan pelatihan khusus untuk berkegiatan ekonomi di dalam new normal setelah pandemi covid-19	Koefisien :400 orang 1865810000	Disetujui dengan melihat prioritas
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Bantuan Modal Usaha KUBE Pengembangan)	tersebar di Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Umbulharjo, Seluruh Kelurahan/Desa	Dana hibah bantuan KUBE	Koefisien : 15 kelompok Anggaran : 300000000	Disetujui dengan melihat prioritas
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Bantuan	tersebar di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	Dana hibah bantuan KUBE	Koefisien : 15 kelompok Anggaran : 300000000	Disetujui dengan melihat prioritas

	Modal Usaha KUBE Pengembangan)				
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Bantuan Modal Usaha KUBE Pengembangan)	tersebar di Kelurahan Purbayan, Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	Dana hibah bantuan KUBE	Koefisien : 15 kelompok Anggaran : 300000000	Disetujui dengan melihat prioritas
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	tersebar di Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kotagede, Kotagede, Seluruh Kelurahan/Desa	Perlibatan RW/RT dalam pendataan bantuan dari Dinsos/KMS	Koefisien : 1 Dokumen Anggaran : 940089957	Disetujui dengan melihat prioritas
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	tersebar di Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Bantuan KMS: survei yang objektif, pembagian dipercepat, bantuan kematian (bedah bumi)	Koefisien : 1 Dokumen Anggaran : 940089957	Disetujui dengan melihat prioritas
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	kantor dinas sosial kota yogyakarta, Kota Yogyakarta, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	mekanisme pengawasan penerima KMS perlu ditingkatkan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi sehingga kelayakan penerima KMS dan kemanfaatannya bisa dipantau lebih baik.	Koefisien : 1 Dokumen Anggaran : 940089957	Disetujui dengan melihat prioritas
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Pemberian Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (300 orang))	Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Pemberdayaan dan pendampingan ekonomi disabilitas	Koefisien : 300 orang Anggaran : 1080000000	Disetujui dengan melihat prioritas
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Penyaluran Bantuan Sosial Pangan)	Notoyudan RW.23/RT.81, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Tindak lanjut bantuan sosial yang tidak tepat sasaran	Koefisien : 19031 KPM Anggaran : 99572250	Disetujui (akan ditindaklanjuti di BPNT)
		Notoyudan RW.25/90, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Bagaimana cara mengusulkan bantuan PEW		Kewenangan Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Penyaluran Bantuan Sosial Pangan)	Jogonegaran RW.14/RT.54, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	Bagaimana tindak lanjut bantuan yang tidak merata	Koefisien : 19031 KPM Anggaran : 99572250	Disetujui (akan ditindaklanjuti di BPNT)
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kemetiran RW.18/RT.61, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Pengajuan KMS di RW.18/RT.61 Kemetiran	Koefisien : 1 Dokumen Anggaran : 940089957	Disetujui dengan melihat prioritas
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Penyaluran Bantuan Sosial Pangan)	Sidomulyo RW.5/RT.17, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	Mohon tindak lanjut bantuan sosial yang salah sasaran di Sidomulyo RW.5/RW.17	Koefisien : 19031 KPM Anggaran : 99572250	Disetujui (akan ditindaklanjuti di BPNT)
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Penyaluran Bantuan Sosial Pangan)	Sidomulyo RW.5/RT.19, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	Bagaimana solusi bantuan sembako yang salah sasaran di Sidomulyo RW.5/RT.19	Rekomendasi : Disetujui (akan ditindaklanjuti di BPNT)	
				Koefisien : 19031 KPM	
				Anggaran : 99572250	

	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia)	Sidomulyo RW.5/RT.18, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	Bantuan BLT bagi lansia di Sidomulyo RW.5/RT.18	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien :6650 KPM	
				Anggaran : 15960000000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Penyaluran Bantuan Sosial Pangan)	Jlagran RW.1/RT.2, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Bagaimana cara mendapatkan bantuan sosial di Jlagran	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 19031 KPM	
				Anggaran : 99572250	
	Pemberian Layanan Kedaruratan (Pelayanan santunan kematian)	Jlagran RW.1/RT.5, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Mohon informasi santunan kematian di RW.1/RT.5 Jlagran	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 600 orang	
				Anggaran : 37460242	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	RT 48 RW 10, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	KMS/PKH lebih objektif Bagaimana caranya mendapat PKH soalnya punya balita sama anak sekolah tapi nggak dapat bantuan apa apa	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	RT 38 RW 09, Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	pelibatan RT dan RW pendataan KMS	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	RT 25 RW 06 Patehan, Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	peninjauan ulang agar tepat sasaran, PKH,KMS,KKS	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	klitren lor RW 05 RT 20, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	KMS warga yang belum terealisasi	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Notoyudan RW.23/RT.79, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Permohonan KMS baru di Notoyudan RW.23/RT.79	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	

		Notoyudan RW.23/RT.79, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Bagaimana cara mendapatkan KIS di Notoyudan RW.23/RT.79		Kewenangan Dinas Kesehatan
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Notoyudan RW.23/RT.82, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Mohon bantuan KMS, karena selama pandemi Covid 19 belum pernah mendapat bantuan di Notoyudan RW.23/RT.82	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Notoyudan RW.25/RT.92, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Bagaimana tindak lanjut bantuan KMS yang tidak tepat sasaran di Notoyudan RW.25/RT.92	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jogonegaran RW.5/RT.22, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	Bagaimana cara endapatkan KMS dan KIS di Jogonegaran RW.5/RT.22	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kemetiran RT.61/RW.18, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Pengajuan KMS baru di RW.18/RT.61 Kemetiran	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
		Sidomulyo RW.5/RT.18, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	Warga RT.18/RW.5 Sidomulyo banyak yang belum mendapatkan BPJS		Kewenangan Pusat
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jlagran RW.01/RT.01, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Banyak Warga RW.01/RT.01 yang belum dapat KMS	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Penyaluran Bantuan Sosial Pangan)	Tinalan, Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	Proses untuk mengakses bansos dirasa rumit dan panjang	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 19031 KPM	
				Anggaran : 99572250	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	wirobrajan, pakuncen, RW 03, RT 17, Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	permohonan untuk evaluasi kembali daftar penerima KMS	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	RW 06, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	mendapatkan PKH	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	

	(Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan)				
				Koefisien : 10765 KPM	
				Anggaran : 268234082	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	RW 06, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	pendataan melibatkan RW dan RT	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan)	RW 03 Kadipaten, Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	integrasi kemiskinan PKH	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 10765 KPM	
				Anggaran : 268234082	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	RW 03 Kadipaten, Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	Pelibatan RT/RW dalam pendataan KMS	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Gampingan RW 09 Pakuncen Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	KMS YANG DI JABUT DI WILAYAH AGAR TIDAK DI SERAHKAN MASALAH INI KE PENGURUS RW SUPAYA TDK TERJADI MASALAH PERSONAL DI WILAYAH	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	RT 01, 02 RW 1 ,RT 40 - 49 RW 8,RW 9, RW 10, Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	KMS/PKH lebih objektif	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	KG Prenggan, Kota Yogyakarta, Prenggan	Pendataan KMS agar transparan	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
		Bumen Prenggan Rw 6, Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	Bantuan untuk UMKM di Masa Pandemi	Rekomendasi : Ditolak	Kewenangan Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
				Koefisien :	
				Anggaran :	

	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	njagran, RW 01, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	permohonan untuk evaluasi kembali KMS yang dicabut	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Bausasran RW 3, Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	masih ditemukan penerima data bansos ganda	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	celeban, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	pendataan penanganan warga miskin melalui 1 pintu saja	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kampung sudagaran Rt 40 Rw 11, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	Usulan KMS	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	RW 09 Karangkajen, Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	Pengusulan KMS dan PIP baru	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	RW 05 Kadipaten, Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	usulan KMS baru	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	RT 17 RW 05 Lempuyangan, Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	Bantuan KMS	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
		pandeyan RW 12, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	warga tidak mampu dibantaran sungai ingin mendapatkan tempat tinggal dirusunawa		Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	wirobrajan, Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	evaluasi penerima KMS	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	RT 36 RW 6 Notoprajan, Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	Pengajuan KMS	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	

	Kota				
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	RT 36 RW 6 Notoprajan, Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan, Seluruh Kelurahan/Desa	Pengajuan KMS	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	RT 25 RW 1 Singosaren, Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	Pengusulan kembali untuk warga yang membutuhkan KMS	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	mergangsari, Kota Yogyakarta, Merangsari, Brontokusuman	evaluasi kembali pencabutan KMS	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	bener, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	evaluasi dalam menilai kelayakan penerima KMS	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan)	bangirejo, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	permohonan program PKH lebih objektif	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 10765 KPM	
				Anggaran : 268234082	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	RW 11 Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	Bantuan KMS: survei yang objektif, pembagian dipercepat, bantuan kematian (bedah bumi) Bantuan Sosial banyak yang tdk tepat sasaran, ada beberapa warga yg dapat malah dobel2	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Patangpuluhan, RW 01 Wirobrajan, Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan	KMS/PKH lebih objektif Bantuan Sosial Tepat sasaran dan objektif dalam pendataan di Wilayah RW 01 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yk	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	

				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Singosaren RW 01 Wirobrajan, Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan	KMS/PKH lebih objektif, Distribusi yang merata dan adil tepat sasaran	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kuncen RW 04 Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	Perlibatan RW/RT dalam pendataan bantuan dari Dinsos/KMS, karena Bantuan Sosial Tidak tepat sasaran dan dobel di program lainnya.	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
		Dukuh, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	Pengaktifan kembali BPJS, yaitu atas nama: Arif Sundawa		Kewenangan Pusat
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Dukuh RW 10, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	Penerbitan kembali KMS bagi Bapak Djoko Umbaran karena sangat membutuhkan	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 1 Dokumen	
				Anggaran : 940089957	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Muja Muju RW 7, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Sosialisai dan penyuluhan tentang Jaminan Sosial kepada masyarakat	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 50 KPM	
				21565000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	giwangan, Kota Yogyakarta, Giwangan	Pelatihan Kerja	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 400 orang	
				Anggaran : 1865810000	
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tinalan, Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	Sosialisai dan penyuluhan tentang Jaminan Kesehatan	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	Kewenangan Dinas Kesehatan
				Koefisien : 50 orang	
				Anggaran : 68011832	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Sambirejo RW 1, Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	Pengajuan untuk sosialisasi jaminan sosial	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 50 KPM	
				21565000	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	kantor dinsosnaker kota yogyakarta, Kota Yogyakarta, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	perlunya pekerja berorganisasi untuk membangun hubungan industrial yang setara saling menghormati,	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	

	Tenaga Kerja		menjunjung kesejahteraan bersama dan membina hubungan harmonis dengan pengusaha dan pemerintah, perlu adanya pelatihan dan pendampingan berserikat bagi pekerja.		
				Koefisien : 200 orang	
				Anggaran : 34000000	
		kota yogyakarta, Kota Yogyakarta, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	banyaknya pekerja bukan penerima upah/sektor informal dan korban PHK selama masa pandemi maka perlu adanya program bantuan pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan.		Kewenangan Pusat
		Dukuh RW 9, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	Program Kartu Indonesia Kerja untuk segera dicairkan.		Kewenangan Pusat
	Penyaluran Bantuan Sosial Pangan	Hotel di wilayah Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Danurejan, Danurejan, Seluruh Kelurahan/Desa	Bantuan paket sembako untuk pekerja hotel sebanyak 250 pekerja, 4 kali dalam satu tahun di wilayah Kecamatan Danurejan	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 19031 KPM	
				Anggaran : 99572250	
	Penyaluran Bantuan Sosial Pangan	Hotel di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Gondokusuman, Seluruh Kelurahan/Desa	Bantuan paket sembako untuk pekerja hotel sebanyak 250 pekerja, 4 kali dalam satu tahun di wilayah Kecamatan Gondokusuman	Rekomendasi : Disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien: 19031 KPM	
				Anggaran : 99572250	
	Pemberian Layanan Rujukan	Jlagran RW.1/RT.5, Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Anak terlantar di Jlagran RW.1/RT.5	Rekomendasi : disetujui dengan melihat prioritas	
				Koefisien : 2 Anak	
				Anggaran : 4260000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c).

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam rangka lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka kinerja difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2022 adalah:

- a. Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- b. Menurunkan angka pengangguran;
- c. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Adapun Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2022 adalah:

- a. Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat;
- b. Angka pengangguran menurun;
- c. Kesejahteraan tenaga kerja meningkat.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Sosial Kota Yogyakarta menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

1. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari tiap seksi dan bagian tata usaha;
2. Memperhatikan program pemerintah Kota Yogyakarta, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
3. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya visi dan misi Walikota Yogyakarta dan amanat regulasi.

Program, kegiatan dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial pada 2022 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 - b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
 - c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - 1.3. Administrasi Umum
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - k. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 2. Program Pemberdayaan Sosial
 - 2.1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 3. Program Rehabilitasi Sosial
 - 3.1. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis, Anak Jalanan, Anak Terlantar Luar Panti
 - a. Penyediaan Permakanan (Anak Terlantar di RPA Wiloso Projo)
 - b. Penyediaan Permakanan (Anak Jalanan)
 - c. Penyediaan Permakanan (Lanjut Usia Terlantar di RPSLU Budhi Dharma)
 - d. Penyediaan Sandang (Anak Terlantar di RPA Wiloso Projo)
 - e. Penyediaan Sandang (Anak Jalanan)
 - f. Penyediaan Sandang (Lanjut Usia Terlantar di RPSLU Budhi Dharma)
 - g. Penyediaan Alat Bantu
 - h. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - i. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Anak Terlantar di RPA Wiloso Projo)
 - j. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Penyandang Disabilitas, Gelandangan Pengemis)
 - k. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Lanjut Usia Terlantar di RPSLU Budhi Dharma)
 - l. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (Anak Terlantar di RPA Wiloso Projo)
 - m. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

- n. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Anak Terlantar di RPA Wiloso Projo)
 - o. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - p. Pemberian Layanan Kedaruratan
 - q. Pemberian Layanan Kedaruratan (Lanjut Usia Terlantar di RPSLU Budhi Dharma)
 - r. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - s. Pemberian Layanan Rujukan
- 3.2. Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban Napza/HIV-AIDS
- a. Pemberian Layanan Kedaruratan
 - b. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (PRS)
 - c. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 4.1. Pemeliharaan Anak Terlantar
- a. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
- 4.2. Penanganan Fakir Miskin
- a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - c. Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat
5. Program Penanganan Bencana
- 5.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- a. Penyediaan Makanan
 - b. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
 - c. Pelayanan Dukungan Psikososial
- 5.2. Kampung Siaga Bencana
- a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- 6.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
7. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- 7.1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
8. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 8.1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

- a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
 - 8.2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - 8.3. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - a. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- 9. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 9.1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - b. Perluasan Kesempatan Kerja
 - c. Penyelenggaraan Unit Disabilitas Ketenaga Kerjaan
 - 9.2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - a. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - b. Job Fair/Bursa Kerja
 - 9.3. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 10. Program Hubungan Industrial
 - 10.1. Pengesahan Peraturan dan pendaftar Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - b. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
 - c. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - 10.2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/Kota
 - a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

- d. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
11. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- 11.1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - c. Pelatihan Transmigrasi
 - d. Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah berimplikasi pada kelompok belanja pada penganggaran program dan kegiatan yang telah disusun. Pada pola sebelumnya, anggaran dibagi dalam kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sedangkan kini, seluruh belanja yang mendukung terlaksananya operasional dan kinerja organisasi menjadi belanja operasional. Belanja operasional pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Program, kegiatan berikut pendanaannya tersaji dalam Tabel.4.1.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					39,367,811,128				11,938,023,084			
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15,617,893,189				11,938,023,084			
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					45,441,880				2,860,900			
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 dokumen	100 persen	2,860,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2,860,900
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 dokumen	100 persen	2,460,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Pengelolaan Website OPD Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	6 dokumen 2 dokumen 12 bulan 3 dokumen	100 persen	40,120,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11,936,382,184				11,935,162,184			
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	81 asn	100 persen	11,935,162,184	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	11,935,162,184
1	06	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	5 dokumen 1 dokumen 12 dokumen	100 persen	1,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,018,251,521				0			
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	11 jenis	100 persen	11,797,005	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0

1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat tulis kantor (58 Jenis) Bahan komputer Peralatan Rumah Tangga	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	60 jenis 13 jenis 25 jenis	100 persen	386,524,856	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Barang cetakan/penggandaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo,	A (Nilai >80 s.d 90)	8 jenis	100 persen	30,630,660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua Kelurahan									
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 jenis	100 persen	6,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Penyediaan makan dan minum rapat Perjalanan Dinas	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	84 kali 24 kali	100 persen	582,399,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,162,253,104					0
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Buku cheque Jasa Pengiriman dokumen Materai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	2 buku 20 kali 2500 lembar	100 persen	25,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran rekening telepon	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 bulan	100 persen	10,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jasa dukung administrasi perkantoran/keuangan Jasa kebersihan kantor Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor Jasa pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor dan jasa keamanan kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah		A (Nilai >80 s.d 90)	14 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 persen	2,126,303,104	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								455,564,500					0
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional STNK Kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	64 unit 64 unit	100 persen	455,564,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								673,105,607					0
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								673,105,607					0
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Pelatihan BSD Pemberdayaan TKSK PSM yang mendapat penyuluhan	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas PSKS	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	90 %	2 kali 14 orang 14 kecamatan	90 persen	237,678,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	90 %	0
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Bantuan operasional PSKS kepada K3, Persatuan Purnawirawan dan Wakawuri dan Polisi (PEPABRI), Kr Taruna, PWRI, IPSM, yayasan Anak Mandiri Gebyar HALUN Musrenbang Tematik Lansia Peringatan hari Kesetiakawanan Sosial	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas PSKS	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua	90 %	6 lembaga 1 kegiatan 14 kali 1 kali 945 orang 5 kejuaraan 4 lokasi	90 persen	403,506,857	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	90 %	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Nasional (HKS/N) PSKS (Kr Taruna, LKS, WKS/BM) yang mendapat penyuluhan di 14 kecamatan Seleksi PSKS (PSM, Kr Taruna, TKSK, LKS, WKS/BM) berprestasi Sistem Layanan dan rujukan terpadu (SLRT) di Kota dan Puskesmas		Kelurahan									
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Pelayanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas PSKS	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	600 orang	90 persen	31,920,000			Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	90 %	0
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								4,380,484,008					0
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								1,444,785,444					0
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Penyediaan Permakanan Anak Terlantar/Anak Jalanan	Penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.01;100 %	20 orang	85 persen	108,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Penyediaan sandang bagi Anak Terlantar/Anak Jalanan	Penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.01;100 %	20 orang	85 persen	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas	Penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.01;100 %	15 unit	85 persen	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Bantuan Modal Usaha KUBE Pengembangan Bimbingan Teknis Manajemen Usaha E Warong KUBE Jasa Bimbingan Teknis Pengembangan KUBE Pendampingan Masyarakat Miskin dan Rentan yang Terlibat dalam KUBE (320) dan USEP (54 kelompok) di 45 Kelurahan	Penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.01;100 %	15 kelompok 25 kelompok 15 kelompok 364 kelompok	85 persen	653,702,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan	pemberian motivasi, pelatihan singkat bagi keluarga disabilitas	Penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar	Kota Yogyakarta, Semua	87.01;100 %	20 orang 350 orang	85 persen	124,627,832	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan	87.01;100 %	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga, Anak Terlantar	serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kecamatan, Semua Kelurahan							advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial		
1 06 04 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Pemberian akses Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak bagi anak terlantar dan anak jalanan.	Penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.01;100 %	5 anak	85 persen	15,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Akses Pelayanan Jamkesus Terpadu bagi Penyandang Disabilitas Pemantauan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui Musrenbang Tematik Disabilitas, Bimtek Forum Kecamatan Inklusi (FKI) di 12 kecamatan Peringatan Hari Disabilitas Internasional	Penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.01;100 %	200 orang 12 bulan 500 orang	85 persen	441,275,132	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	operasional pelayanan kedaruratan sosial	Penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.01;100 %	12 bulan	85 persen	29,800,000			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Penelusuran keluarga untuk anak terlantar	Penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.01;100 %	5 anak	85 persen	8,770,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	layanan rujukan untuk anak terlantar ke lembaga sosial	Penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.01;100 %	2 anak	85 persen	4,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								2,935,698,564					0
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu	Bantuan Sosial Orang Terlantar kehabisan bekal dalam perjalanan Bantuan Sosial Santunan Kematian sebesar @ Rp	Dukungan terhadap rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	87.01;100 %	160 orang 600 orang 12 bulan 30 orang 600 orang	100 persen	1,549,564,732	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu	87.01;100 %	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	3.000.000,- Layanan TRC PMKS Pelayanan pemakaman jenazah terlantar Pelayanan santunan kematian Penanganan Covid-19 Penanganan Orang Terlantar kehabisan bekal dalam perjalanan	diluar panti sosial	Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 160 orang					Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial		
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Pemberian Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (300 orang) pemberian bimbingan sosial, motivasi, pelatihan singkat bagi korban tindak kekerasan pemberian bimbingan sosial, motivasi, pelatihan singkat bagi penyandang disabilitas Pemberian Bimbingan Sosial, Motivasi, Pelatihan Singkat Bagi Perempuan Rawan sosial Ekonomi Pemberian motivasi mental, spiritual, dan sosial bagi ABH	Dukungan terhadap rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS)lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.01;100 %	300 orang 20 orang 20 orang 15 orang	100 persen	1,318,122,000			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1 06 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Rekomendasi keringanan biaya pendidikan (100 orang) dan penjaminan kesehatan (50 orang) bagi warga miskin	Dukungan terhadap rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS)lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.01;100 %	150 orang	100 persen	68,011,832	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									18,558,731,492				0
1 06 05 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar									16,500,000				0
1 06 05 2.01 03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani	Pendampingan dan Monev penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA.	Pemeliharaan anak-anak terlantar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 lksa	100 persen	16,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani	100 %	0
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									18,542,231,492				0
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Database PBI Jaminan Kesehatan (PBIUK) Hasil Validasi Database Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Database Penyandang disabilitas (PD)	fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota,dukungan terhadap perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.34 %	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	100 persen	1,608,353,704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87.34 %	0
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Pemakaman jenazah terlantar Penyaluran Bansos KSJPS Penyaluran bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin untuk pemenuhan kebutuhan dasar	fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota,dukungan terhadap perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.34 %	30 jenazah 1616 kpm 6650 kpm 10227 kpm 15444 kpm	100 persen	16,610,312,788	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87.34 %	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			selama 10 bulan @Rp.180.000 Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan Penyaluran bantuan Program Sembako		Kelurahan									
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Bantuan Modal Usaha UEP PKH Graduasi Mandiri Bimtek Calon Penerima UEP PKH Graduasi alami Bimtek Calon Penerima UEP PKH Graduasi Mandiri	fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota,dukungan terhadap perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.34 %	100 kpm 50 kpm 100 kpm	100 persen	323,565,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87.34 %	0
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								111,271,832					0
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								85,821,832					0
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana yang tertangani	Pengadaan dan pengelolaan Bufferstock logistik bencana target	Pemeliharaan anak-anak terlantar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 jenis	85 persen	84,381,832	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	0
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana yang tertangani	Pendampingan dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan	Pemeliharaan anak-anak terlantar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 kecamatan	85 persen	720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	0
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana yang tertangani	Pendampingan dukungan psikososial	Pemeliharaan anak-anak terlantar	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 kecamatan	85 persen	720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	0
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								25,450,000					0
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Operasional kampung siaga bencana	Perlindungan korban bencana	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 ksb	100 persen	2,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	0
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Operasional TAGANA Operasional Tenaga Pelopor Perda maian Penguatan Kapasitas personil Taruna Siaga Bencana Penyebarluasan media informasi kebencanaan	Perlindungan korban bencana	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	69 tagana 35 orang 69 tagana 14 kecamatan	100 persen	23,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	0
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								26,325,000					0
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								26,325,000					0
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase makam pahlawan yang terpelihara	Perawatan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/Kota	makam pahlawan terawat	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 makam	100 persen	26,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase makam pahlawan yang terpelihara	100 %	0
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								3,717,255,940					1,119,578,200

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								160,938,400				0	
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								160,938,400				0	
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Data penganggur Perencanaan tenaga kerja daerah yang disusun	Dukungan terhadap perencanaan tenaga kerja daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66.61 %	1 dokumen 1 dokumen	94.38 %	160,938,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK)	66.61 %	0
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								1,621,442,760				0	
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								1,468,228,760				0	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan Barista Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan Cake & Pastry Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan Event Organizer Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan Komputer Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan Membatik Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan Menjahit Dasar Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan Menjahit Terampil Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan Satpam Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan Social Media Marketing Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan Stir Mobil dan SIM A Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan Tata Rias Kecantikan Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan Web Programmer	Dukungan terhadap peningkatan keterampilan pencari kerja	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,40 %	20 Orang 50 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 25 orang 50 orang 20 orang 25 orang	91.4 %	1,468,228,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91,40 %	0
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								117,234,000				0	
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	Lembaga pelatihan kerja yang dibina	Dukungan terhadap peningkatan keterampilan pencari kerja	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,40 %	30 lpk	91.4 %	117,234,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91,40 %	0
2 07 03 2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil								35,980,000				0	
2 07 03 2.04 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan produktivitasnya	Dukungan terhadap peningkatan keterampilan pencari kerja	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,40 %	40 Perusahaan/U KM/IK	91.4 %	35,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91,40 %	0
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								917,075,840				0	
2 07 04 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota								594,438,000				0	
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	Pembekalan calon pencari kerja SMK bertanda daftar BKK	Dukungan terhadap pelayanan antar kerja di daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan,	70.18 %	300 orang	70 %	18,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penempatan tenaga kerja	70.18 %	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua Kelurahan									
2 07 04 2.01 04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase penempatan tenaga kerja	Terlaksananya Diseminasi dan Sinkronisasi Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Dukungan terhadap pelayanan antar kerja di daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.18 %	160 perusahaan	70 %	43,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penempatan tenaga kerja	70.18 %	0
2 07 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	Tenaga Kerja mandiri dan Tenaga kerja lokal yang mengikuti padat karya	Dukungan terhadap pelayanan antar kerja di daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.18 %	148 orang	70 %	532,788,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penempatan tenaga kerja	70.18 %	0
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								295,967,840					0
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase penempatan tenaga kerja	Diseminasi dan sinkronisasi data forum Bursa Kerja Khusus (BKK) Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja	Dukungan terhadap penempatan tenaga kerja	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.18 %	35 bkk 700 orang	70 %	178,017,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penempatan tenaga kerja	70.18 %	0
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	Laporan Penempatan Tenaga Kerja Peserta Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	Dukungan terhadap penempatan tenaga kerja	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.18 %	40 Laporan Perusahaan	70 %	117,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penempatan tenaga kerja	70.18 %	0
2 07 04 2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								26,670,000					0
2 07 04 2.05 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penempatan tenaga kerja	Sinkronisasi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja di kota Yogyakarta	Dukungan terhadap penempatan tenaga kerja	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.18 %	50 perusahaan	70 %	26,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penempatan tenaga kerja	70.18 %	0
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								1,017,798,940					1,119,578,200
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								411,587,940					452,746,800
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan oleh Instansi Ketenagakerjaan, Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan	Dukungan Terhadap Kondisi Perusahaan dan Pekerja yang Kondusif	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.26 %	25 sk	37.97 %	69,084,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	38.26 %	75,992,400
2 07 05 2.01 02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Pemahaman tentang seluk beluk Perjanjian Kerja (PK) dan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara komprehensif.	Dukungan Terhadap Kondisi Perusahaan dan Pekerja yang Kondusif	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.26 %	15 dokumen	37.97 %	70,334,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	38.26 %	77,367,400
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Desiminasi pengupahan secara door to door Desiminasi PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan : Desiminasi Perhitungan Upah dan Workshop struktur skala upah	Dukungan Terhadap Kondisi Perusahaan dan Pekerja yang Kondusif	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.26 %	12 perusahaan 150 perusahaan 200 perusahaan 1 dokumen	37.97 %	272,169,940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	38.26 %	299,387,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Desiminasi UMK Penetapan UMK dan Fasilitas Dewan Pengupahan											
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								606,211,000				666,831,400	
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Desiminasi PP 37 Thn 2021 ttg Pengelenggaraan Program Jaminan kehilangan Pekerjaan Peringatan hari buruh nasional kota Yogyakarta -Dialog Hubungan Industrial Pertemuan regional fungsional mediator ketenagakerjaan se DIY Temu Konsultasi Mediator Se DIY Tim deteksi dini ketenagakerjaan	Dukungan Terhadap Kondisi Perusahaan dan Pekerja yang Kondusif	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.26 %	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	37.97 %	197,372,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	38.26 %	217,109,200	
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Bimtek Teknik Bernegosiasi desiminasi PP 35 Thn 2021 ttg perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial	Dukungan Terhadap Kondisi Perusahaan dan Pekerja yang Kondusif	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.26 %	1 kali 1 kali 1 kali	37.97 %	106,166,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	38.26 %	116,782,600	
2 07 05 2.02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Pembinaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Kota Yogyakarta SP/SB yang Diverifikasi	Dukungan Terhadap Kondisi Perusahaan dan Pekerja yang Kondusif	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.26 %	1 dokumen 1 dokumen	37.97 %	50,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	38.26 %	55,616,000	
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Pembentukan Tim Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan Perubahan perda 13 tahun 2009 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan	Dukungan Terhadap Kondisi Perusahaan dan Pekerja yang Kondusif	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.26 %	3 kesepakatan 3 kesepakatan	37.97 %	142,206,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	38.26 %	156,426,600	
2 07 05 2.02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Desiminasi Insentif dan uang Bonus Desiminasi Jaminan sosial kehilangan pekerjaan sesuai PP No 37 th 2021 Desiminasi Uang servis dan THR Keagamaan Pembinaan dan monitoring Pengembangan Kesejahteraan Pekerja dan jaminan sosial Pembinaan dan Monitoring THR keagamaan	Dukungan Terhadap Kondisi Perusahaan dan Pekerja yang Kondusif	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.26 %	50 perusahaan 150 perusahaan 100 perusahaan 1 dokumen 30 perusahaan	37.97 %	109,907,000		Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	38.26 %	120,897,000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								235,507,800				0	
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								235,507,800				0	
3 32 03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								235,507,800				0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 32 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penempatan transmigran	kerjasama dengan daerah tujuan	Dukungan terhadap kawasan transmigrasi yang terbangun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 daerah	100 %	52,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penempatan transmigran	100 %	0
3 32 03 2.01 04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penempatan transmigran	Penempatan calon transmigran	Dukungan terhadap kawasan transmigrasi yang terbangun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 kk	100 %	20,425,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penempatan transmigran	100 %	0
3 32 03 2.01 06	Pelatihan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	Calon Transmigrasi mengikuti pelatihan pra penempatan	Dukungan terhadap kawasan transmigrasi yang terbangun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 kk	100 %	48,142,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penempatan transmigran	100 %	0
3 32 03 2.01 07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	Pemberian perbekalan kepada calon transmigran	Dukungan terhadap kawasan transmigrasi yang terbangun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 kk	100 %	114,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penempatan transmigran	100 %	0
TOTAL									43,320,574,868					13,057,601,284

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.07.3.32.01.01 UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										1,538,974,704		0			
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										1,538,974,704		0		
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										1,538,974,704		0	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Penyediaan Permakanan Bagi Lansia Terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia (RPSLU)	Penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangman	87.01;100 %	68 orang	87 persen	845,313,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Penyediaan Sandang Bagi Lansia Terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia (RPSLU)	Penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangman	87.01;100 %	68 orang	87 persen	106,063,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Reunifikasi Keluarga untuk Lansia di UPT RPSLU Budhi Dharma	Penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangman	87.01;100 %	5 orang	87 persen	2,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di UPT Budhi Dharma	Penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangman	87.01;100 %	68 orang	87 persen	548,261,544	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan Lansia di UPT RPSLU berupa Shelter dan Day Care bagi Lansia	Penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangman	87.01;100 %	5 orang	87 persen	36,936,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
TOTAL												1,538,974,704		0			

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.07.3.32.01.02 UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											851,765,836		0			
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											851,765,836		0		
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial											851,765,836		0	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Penyediaan Permakanan Bagi Anak Terlantar (AT) di Rumah Pengasuhan Anak (RPA) Wiloso Projo	Dukungan penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar pantli sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	87.01;100 %	30 orang	100 persen	353,443,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Penyediaan Sandang Bagi Anak Terlantar (AT) di Rumah Pengasuhan Anak (RPA) Wiloso Projo	Dukungan penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar pantli sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	87.01;100 %	30 orang	100 persen	67,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak Terlantar di UPT RPA (Rumah Pengasuhan Anak)	Dukungan penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar pantli sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	87.01;100 %	30 orang	100 persen	53,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi anak terlantar di UPT RPA (Rumah Pengasuhan Anak)	Dukungan penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar pantli sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	87.01;100 %	30 orang	100 persen	181,732,836	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0

1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Pemberian Biaya Pendidikan dan Persediaan Obat-obatan bagi Anak Terlantar di UPT RPA Wiloso Projo	Dukungan penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang tertangani	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	87.01;100 %	30 anak	100 persen	195,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	87.01;100 %	0
TOTAL													851,765,836		0		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2022 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Perencanaan kerja ini nantinya diimplementasikan dalam aktivitas yang bersifat operasional oleh pengampu masing-masing kegiatan. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2022 diharapkan prioritas program dan kegiatan dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian target kinerja. Manakala ketersediaan APBD tidak sesuai dengan kebutuhan dalam Rencana Kerja ini, maka perlu dilakukan penyesuaian volume target dan sasaran yang pada akhirnya mempengaruhi pula pencapaian target kinerja.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini menjadi bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD yang merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari **Kamis** tanggal **25 Maret tahun 2021** telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah **Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta** Tahun 2022 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	√		
	1.1. Latar Belakang	√		
	1.2. Landasan Hukum	√		
	1.3. Maksud dan Tujuan	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	√		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	√		Judul untuk disesuaikan dengan nomenklatur
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.1	√		Tabel untuk diberi judul sesuai dengan nomenklatur
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.2	√		Susunan Tabel 2.2 disesuaikan dengan nomenklatur
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	√		
	Tabel 2.3	√		
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√		
	Tabel 2.4	√		
3	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	√		
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	√		
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	√		
	3.3. Program dan Kegiatan	√		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√		Judul untuk disesuaikan dengan nomenklatur
	Tabel 4.1 (di SIPD)	√		
5	BAB V. PENUTUP	√		

II. Hal-hal Penting untuk Dictermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	√		
2.	Tolok ukur rigid	√		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan		√	Pagu masih melebihi pagu

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, pagu maksimal OPD sama dengan pagu 2021			tahun 2021
4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD		√	Sedang dalam proses penyusunan
5.	Belanja modal muncul pada nomenklatur output		√	
6.	Kelengkapan Renja: Pra RKA		√	Belum dilampirkan
7.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan		√	Tidak ada DAK
8.	Mengacu SPM dan SDG's	√		Mengacu SPM dan SDG's
9.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah	√		
10.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos	√		Sudah terakomodir
11.	Kesesuaian dengan tupoksi	√		Masih ada sub kegiatan kewenangan DIY, ada sub kegiatan yang tidak sesuai tusi sehingga perlu usulan revisi Tupoksi ke Bagian Organisasi
12.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)		√	Tidak ada pekerjaan fisik
13.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai		√	Semua kegiatan agar diinputkan di SIRUP setelah DPA disahkan
14.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan	√		
15.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku	√		
16.	Pengawalan GAP/GBS		√	Belum dilampirkan
17.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/ProsesRenja2022	√		
18.	<p>CATATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada Rancangan Renja Tahun 2022 Dinsosnakertrans mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 49.287.240.181,- yang telah memasukkan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN. Usulan anggaran ini mengalami kenaikan sebesar Rp 3,165,334,492,- dari anggaran murni tahun 2021 sebesar Rp 46,121,905,689,-. Kenaikan usulan anggaran ini dikarenakan penambahan output baru, peningkatan volume dan jenis belanja kegiatan. - Pendataan KSJPS tetap diakomodasi namun akan disesuaikan dengan kebijakan pengalihan anggaran untuk intervensi kemiskinan. - Masih ada sub kegiatan yang merupakan kewenangan DIY dan ada sub kegiatan yang tidak sesuai tusi sehingga perlu usulan revisi Tupoksi ke Bagian Organisasi. - Revisi untuk perbaikan sampai dengan hari Senin, 29 Maret 2021. 			

III. Review Renstra

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-4; PERUBAHAN 2020)		PERMENDAGRI 90/2019 (REVIEW RENSTRA KE-4; 2021-2022)							KEPMEN 050-3708/2020						
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
		1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
		1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
PROGRAM DATA, INFORMASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	88%	90%	1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	88%	90%
PROGRAM ADVOKASI DAN REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dengan advokasi	1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi	84%	87%	1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi	84%	87%

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-4; PERUBAHAN 2020)		PERMENDAGRI 90/2019 (REVIEW RENSTRA KE-4; 2021-2022)						KEPMEN 050-3708/2020							
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
	dan rehabilitasi sosial					dan rehabilitasi sosial							dan rehabilitasi sosial		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100%	100%					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100%	100%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	85%	85%	1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	85%	85%
						Persentase Pemerlu Pelayanan	100%	100%					Persentase Pemerlu Pelayanan	100%	100%

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-4; PERUBAHAN 2020)		PERMENDAGRI 90/2019 (REVIEW RENSTRA KE-4; 2021-2022)						KEPMEN 050-3708/2020							
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
						Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani							Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani		
		1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%
		1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	100%	100%	1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	100%	100%
		2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
		2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK)	99.24%	94,38%	2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK)	99.24%	94,38%

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-4; PERUBAHAN 2020)		PERMENDAGRI 90/2019 (REVIEW RENSTRA KE-4; 2021-2022)							KEPMEN 050-3708/2020						
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
		2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91%	91,40%	2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91%	91,40%
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan tenaga kerja	2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	68.00%	70%	2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	68.00%	70%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	37.06%	37,97%	2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	37.06%	37,97%
		3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-4; PERUBAHAN 2020)		PERMENDAGRI 90/2019 (REVIEW RENSTRA KE-4; 2021-2022)							KEPMEN 050-3708/2020						
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
		3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	100.00%	100.00%	3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	100.00%	100.00%

Catatan:

1. Target indikator program akan dikoordinasikan lebih lanjut.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Maret 2021

Pimpinan Sidang



Maya Silaturachmi, S.I.P.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Fatmah Rosyati,Sip	BKPSDM	
2.	Ari Arif Purnamawati	Dinsosnakertrans/ RPA Wiloso Projo	
3.	Pipin Ani Sulistiati, SIP	Dinsosnakertrans Kota Yk	
4.	R.Irwantono, SH	Dinsosnakertrans	
5.	Polana Setiya Hati	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
6.	Sutini Sri Lestari	Dinsonakertrans	
7.	Maya Silaturachmi	Bappeda	